

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Kompetensi Guru

Kompetensi (*competence*) secara harfiah berarti kecakapan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan. Kompetensi seseorang dapat dilihat pada diri seseorang saat beraktivitas, melaksanakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, memecahkan masalah, dan sebagainya, artinya kompetensi dapat terlihat dalam perilaku atau performansi. Performansi yang dapat diamati itu tentu saja didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikuasai orang tersebut. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk kecakapan yang didasari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki seseorang yang terwujud dalam performansinya. Atau, dalam istilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai atau dimiliki.

Kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang. Seorang guru agar menguasai kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai berikut: 1) Kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai pengetahuan serta keterampilan/keahlian kependidikan dan pengetahuan materi bidang studi yang diajarkan, 2) Kemampuan efektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain, dan 3) Kemampuan psikomotor, yakni kemampuan

yang berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai pengajar.

Menurut McAshan dalam artikel jurnal Endang Komara, “...*A knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which became part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, effective, and psychomotor behaviors*”. Lebih lanjut dikatakan bahwa kompetensi itu adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.<sup>1</sup> Dari pendapat tersebut di atas, maka jelas suatu kompetensi harus didukung oleh pengetahuan, sikap, dan apresiasi. Artinya, tanpa pengetahuan dan sikap tidak mungkin muncul suatu kompetensi tertentu.

Selama ini ada yang beranggapan bahwa mengajar bukanlah pekerjaan profesional. Hal ini disebabkan setiap orang bisa mengajar. Siapa pun bisa menjadi guru, asal saja ia menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada orang lain. Ada seseorang, walaupun ia tidak memahami ilmu keguruan, mereka dianggap sebagai guru. Apabila mengajar dianggap hanya sekadar proses penyampaian informasi, tentu saja pendapat tersebut ada benarnya. Konsep mengajar yang demikian,untutannya sangat sederhana, asal paham informasi yang harus diberikan pada siswa, maka ia dapat menjadi guru. Tapi mengajar tidak sesederhana itu. Tugas mengajar bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam proses mengajar, terdapat kegiatan membimbing siswa agar berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya,

---

<sup>1</sup> Endang Komara, *Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Cimahi: Magister IPS STKIP Pasudan, 2012), h.2

malatih keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat hidup dalam masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan, memotivasi siswa agar tetap semangat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kemampuan merancang dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar untuk menambah efektivitas mengajarnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Menurut *James M. Cooper* (1990:2) dalam jurnal Endang Komara mengemukakan bahwa: ‘*A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new and different ways*’. Oleh karena guru perlu memiliki kemampuan-kemampuan itulah, maka guru merupakan jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.<sup>2</sup>

Kompetensi sangat diperlukan dalam menjalankan pekerjaan, karena kompetensi sangat menentukan kualitas kerja seseorang. Kompetensi juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian dalam melakukan pengembangan. Organisasi yang tidak memiliki pengembangan dan menciptakan motivasi kompetensi karyawannya, jangan harap terjadi perbaikan dalam produktivitas, profitabilitas, dan kualitas terhadap produk dan jasa. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan harus meningkatkan kompetensi guru-gurunya jika ingin terjadi perbaikan kualitas dan peningkatan prestasi sekolahnya<sup>3</sup>.

Bersasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan yuridis tentang kompetensi guru dan Sertifikasi pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Guru wajib memiliki sertifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.2

<sup>3</sup> *Op cit*, h.3

tujuan pendidikan nasional.<sup>4</sup> Sedangkan pasal (3) disebutkan bahwa: kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan diktum ayat tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa terdapat empat kompetensi yang harus melekat pada guru<sup>5</sup>. Kompetensi tersebut menjadi tolak ukur kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesional sebagai guru, Adapun kompetensi tersebut di atas telah telah tercantum dalam penajalasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang nasional pendidikan, yaitu sebagai berikut di bawah ini:

#### 1. Kompetensi Pedagogik.

Secara singkat, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Hal diperkuat oleh Endang Koswara, bahwa kompetensi pedagogik yaitu guru harus memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya<sup>6</sup>.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kemampuan mengelola pembelajaran

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, (Jakarta : Kemendiknas, 2005) h. 4

<sup>5</sup> *Ibid* UU Nomor 14 tahun 2005, h. 4

<sup>6</sup> Endang Koswara, artikel jurnal *Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (2012), h.

peserta didik tersebut meliputi pemahaman tentang perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimilikinya. Lebih lanjut dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan yaitu:

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b) pemahaman terhadap peserta didik, c) pengembangan kurikulum atau silabus, d) perancangan pembelajaran, e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, e) evaluasi hasil belajar, dan g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Sebagai pembanding dalam tulisan ini perlu juga disampaikan standar kompetensi bagi guru di Amerika Serikat dari *National Board for Profesional Teaching*<sup>8</sup>. Rumusan kompetensi tersebut dihadikan sebagai dasar untuk memperoleh sertifikasi bagi guru dengan rumusan *What Teacher Should Know and Be Abe to Do* (apa yang dipikir dan dilakukan guru) yang di dalamnya terdapat lima posisi, yaitu:

1) *Teachers are committed to Students and their learning* (guru berkomitmen untuk siswa dan belajarnya) yang mencakup: (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, c) perlakuan guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan d) misi guru dalam memperluas cakrawala berfikir siswa. 2) *Teacher know the subject they teach and hkanyow teach those subject to students* (guru mengetahui materi dan untuk mengajarkan materi kepada siswa), meliputi: (a) apresiasi guru tentang pemahaman materi pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain, (b) kemampuan guru untuk menyampaikan pelajaran dan (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (*multiple path*).

---

<sup>7</sup> Perpu No. 19 tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: BSNP, 2005), h. 21

<sup>8</sup> Richey, R.C. *Intruactional Design Competencies: The Standar Syaracuse*, (New York: Clearing houses on Intruactional and Technology, 2002), p.3

1) *Teachers are responsible for managing and monitoring students learning* (guru responsif mengelola dan memonitor siswa), terdiri atas: (a) penggunaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran, (b) menyusun proses pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (group setting), kemampuan memberikan ganjaran (reward) atas keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa secara teratur, dan (d) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran. 2) *Teachers think systematically about their practice and learn from experience* (guru berfikir sistematis tentang praktiknya dan belajar dari pengalaman), mencakup: (a) guru secara terus menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran kepada pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran. 3) *Teachers are members of learning communities* (guru adalah anggota komunitas belajar) yang meliputi: (a) guru memberikan kontribusi terhadap aktivitas sekolah melalui kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya, b) guru bekerja sama dengan orang tua siswa, dan (c) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat.

## 1. Kompetensi Profesional

Guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan beberapa keahlian khusus. Kriteria profesional guru menurut Hamalik dalam Musadad sebagai berikut:

- 1) Fisik, yaitu meliputi: (a) sehat jasmani dan rohani, (b) tidak punya cacat tubuh yang dapat menimbulkan ejekan/cemoohan, atau rasa kasihan dari peserta didik.
- 2) Mental kepribadian, yaitu: a) berkepribadian dan berjiwa pancasila, b) mampu menghayati GBHN, c) menintai bangsa dan sesama manusia, dan rasa kasih sayang kepada anak didik, d) berkepribadian yang luhur, e) berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara profesional, f) mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, g) mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, h) mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, i) bersifat terbuka, peka dan inovatif, j) menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya, k) ketaatan akan disiplin, dan i) memiliki *sense of humor*.
- 3) Keilmiahan/pengetahuan, adalah: a) memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, b) memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkan dalam tugas sebagai pendidik, c) memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, d) memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, e) sedang membaca buku-buku ilmiah, f) mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, g) memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.

- 4) Keterampilan, yaitu: a) mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar, b) mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, c) mampu menyusun garis besar program pengejaran, d) mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, e) mampu merencanakan dan melakukan evaluasi pendidikan, f) memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.<sup>9</sup>

Profesional guru meliputi unsur-unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. Hal ini berarti kompetensi guru tentu saja mencakup ketiga komponen tersebut yang penekanannya terletak pada unsur keterampilan. Guru sebagai pendidik dan pengajar dapat melaksanakan perannya jika memenuhi persyaratan kepribadian dan penguasaan ilmu. Guru mampu mendidik dan mengajar jika kestabilan emosi, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan peserta didik, bersikap realistis, jujur, serta terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan.

Profesionalisme kepribadian seorang guru akan menjadi teladan bagi kepribadian peserta didik. Guru yang mempunyai tanggung jawab yang besar, jujur, mempunyai emosi yang stabil, terbuka dan demokratis akan menjadi cermin bagi peserta didik untuk bersikap yang sama. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan dihormati, dan disegani peserta didik.

Sebagai pendidik dan pengajar, guru dituntut memiliki penguasaan ilmu, antara lain mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai bahan pelajaran, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran/bidang studi yang diajarkan, menguasai teori dan praktik mendidik, teori kurikulum, metode dan model pembelajaran, teknologi pendidikan, teori evaluasi, psikologi belajar, dan

---

<sup>9</sup> Musadad.A.A., *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Berbasis Multi kultural untuk meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMP Kota Surakarta*, (Disertasi Pendidikan Manajemen Pendidikan, PPS Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 54.

sebagainya. Guru harus mempunyai wawasan yang luas sehubungan dengan pengetahuan yang diajarkan. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan, agar tidak tertinggal dari laju perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat tersebut dan sangat mungkin juga dapat dengan mudah dikuasai oleh peserta didiknya, melalui berbagai media yang semakin canggih. Dalam mengajar guru senantiasa menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan sesuai dengan teori-teori pendidikan. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang benar. Dengan kompetensinya di bidang pengetahuan, guru dapat menjadi sumber belajar, fasilitator, dan dinamisator dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan kompetensi profesional guru tersebut menuntut kemampuan, yang diantaranya meliputi: a) kemampuan menyiapkan bahan pelajaran, b) kemampuan menyusun satuan pelajaran, c) kemampuan menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, d) menggalakan semangat belajar peserta didik, e) memilih alat peraga pendidikan, f) melaksanakan penilaian hasil belajar, g) menggunakan bahasa baik dan benar, g) mengatur disiplin kelas, dan berbagai keterampilan lainnya.

Kualitas proses belajar mengajar di kelas sangat tergantung pada kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta keterampilan dalam mengelola kelas. Kompetensi kepribadian dan kompetensi pengetahuan guru yang baik, akan kurang berarti jika guru tidak terampil dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Kompetensi keterampilan akan memudahkan transfer pengetahuan yang



diperlukan peserta didik. Peserta didik lebih mudah dalam menerima materi pelajaran, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan.

Menurut Darma dalam Musadad bahwa kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui program pelatihan. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, sehingga program pelatihan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kompetensi profesional guru.<sup>10</sup>

Indikator seorang guru memiliki kompetensi profesional adalah menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup 1) penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah; 2) substansi keilmuan yang menaungi materi tersebut; dan 3) penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Salah satu tugas guru sebagai agen pembelajaran adalah merancang pembelajaran, termasuk di dalamnya merancang materi pembelajaran. Materi yang tercantum dalam kurikulum dan silabus hanya merupakan acuan atau pedoman dasar. Sementara untuk melaksanakannya di kelas, guru perlu meramu dan mengemasnya lagi. Memilih, merencanakan, merancang, dan menetapkan materi pembelajaran untuk siswa tidak dilakukan seenaknya, tapi harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut: 1) relevansinya dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar; 2) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa; 3) struktur keilmuan; 4) kedalaman dan keluasan materi; 5) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 6) alokasi waktu.

Menurut Endang Komara bahwa Kompetensi profesional yakni menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h 56

pengetahuan/materi bidang studi. Kompetensi sosial antara lain mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

#### a. Persyaratan Profesi

Menurut Usman bahwa mengingat tugas guru dan tanggung jawab guru yang begitu besar, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus yaitu:

1) Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya, 3) Menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai, 4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, dan 5) Memungkinkan perkembangan yang sejalan dengan dinamika.<sup>11</sup>

Selain persyaratan di atas menurut Usman masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi. Persyaratan tambahan tersebut adalah: a) memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya, b) memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti guru dengan siswanya, c) diakui oleh masyarakat karena memang jasanya diperlukan masyarakat.<sup>12</sup>

Sedangkan Yamin dan Maisah mengatakan bahwa persyaratan profesional guru dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Konsep struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, 2) Menguasai menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum, 3) Memahami keterkaitan antar

---

<sup>11</sup> Usman. M.U. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 15

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 14

konsep mata pelajaran, 4) Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan 5) Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.<sup>13</sup>

b. Indikator Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.

Menurut Yamin dan Maisah bahwa setiap subkompetensi memiliki indikator yang esensial sebagai berikut: 1) substansi keilmuan yang berkaitan dengan program studi memiliki indikator memahami materi ajar terdapat dalam kurikulum, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar, memahami konsep antar mata pelajaran yang terkait, serta menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, 2) menguasai struktur dan metode keilmuan mempunyai indikator, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi di bidang studi secara profesional.<sup>14</sup>

Sementara Usman membagi kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- 1) Menguasai landasan pendidikan yakni: a) Menguasai tujuan pendidikan: (1) Mengkaji tujuan pendidikan nasional, (2) Mengkaji tujuan pembelajaran, (3) Meneliti tujuan pembelajaran dengan tujuan pendidikan nasional, dan (4) Mengkaji kegiatan pembelajaran yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. b). Mengenai fungsi sekolah dan masyarakat: (1) Mengkaji peran sekolah sebagai pusat

---

<sup>13</sup> Yamin dan Maisah. *Manajemen Pembelajaran Kelas., Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 11

pendidikan dan kebudayaan, (2) Mengkaji peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, (3) Mengelola kegiatan sekolah yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. c) Mengenal prinsip-prinsip belajar psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran (1) Mengkaji jenis perbuatan untuk memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap, (2) Mengkaji prinsip-prinsip belajar, (3) Menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan pembelajaran.

2) Menguasai bahan pengajaran yakni (a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum: (1) Mengkaji isi kurikulum, (2) Menelaah isi buku teks, (3) Menelaah isi buku pedoman khusus bidang studi, (4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks dan buku pedoman khusus. (b) Menguasai Bahan pengayaan: (1) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan mata pelajaran, (2) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru

3) Menyusun program pengajaran yakni: a) Menetapkan tujuan pendidikan: (1) Mengkaji ciri-ciri tujuan pembelajaran (2) Merumuskan tujuan pembelajaran, (3) Menetapkan tujuan pembelajaran untuk satu pokok bahasan. b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran: (1) Dapat memilih bahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran (2) Mengembangkan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran c) Memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran: (1) Mengkaji berbagai metode mengajar, (2) Dapat memilih metode mengajar yang tepat, (3) Merancang skenario pembelajaran yang tepat. d) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran: (1) Mengkaji berbagai media pembelajaran, (2) Memilih media pembelajaran, (3) Membuat media pembelajaran sederhana, (4) Menggunakan media pembelajaran, dan (5) Menggunakan media pembelajaran e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar: (1) Mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar, (2) Memanfaatkan sumber belajar yang tepat

4) Melaksanakan hasil dan proses pembelajaran: a) Menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan (1) Mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas, (2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana pembelajaran (3) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (4) Menangani masalah pembelajaran dan pengelolaan kelas. b) Mengatur ruang belajar sesuai kebutuhan. (1) Mengkaji berbagai tata ruang kelas, (2) Mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas, dan (3) Mengatur ruang belajar yang tepat sesuai kebutuhan. c) Mengelola interaksi: dalam proses pembelajaran (1) Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan pembelajaran, (2) Dapat mengamati kegiatan pembelajaran, (3) Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, (4) Dapat menggunakan berbagai keterampilan dasar mengajar, dan (5) Dapat mengatur peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

5) Menilai hasil dan proses pembelajaran: a) Menilai hasil dan proses pembelajaran, (1) Mengkaji konsep dasar penilaian, (2) Mengkaji

berbagai teknik penilaian, (3) Menyusun alat penilaian, (4) Mengkaji cara mengolah dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian peserta didik, dan (5) Dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik

6) Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

- (a) Menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran
- (b) Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Seorang guru dinyatakan memiliki kompetensi kepribadian apabila ia memiliki kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Guru, sejak lama telah dimaknai dan dicitrakan sebagai sosok ‘yang digugu dan ditiru’. Citra ini telah tumbuh dalam sejarah Islam, pada zaman Yunani, Mesir kuno, dll serta melekat hingga sekarang. Mereka adalah sosok yang layak dijadikan panutan atau teladan, terutama bagi murid-muridnya. Dengan citra ini, mereka dituntut tidak saja mahir di bidangnya sebagai guru, tapi juga harus menjadi figur yang baik. Sebagai figur, guru dituntut untuk betul-betul menjaga kepribadian, perilaku, dan perbuatannya.

Selanjut Endang Komara mengatakan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian:

- (1) mantap dan stabil, bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, konsisten dalam bertindak; (2) dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja; (3) arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan disegani; (5) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Op cit.* h.15

Dalam konteks ini, harus disadari bahwa guru bukan hanya dituntut perannya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Peran pengajar hanya terkait dengan tanggung jawab memberikan materi pelajaran dan bisa dibatasi waktu dari jam sekian hingga jam sekian. Peran pendidik lebih dari itu, mereka harus pula mengarahkan moral dan budi pekerti siswa, dalam hal ini tentunya harus dimulai dari guru itu sendiri. Oleh karena itu peran pendidik tidak dibatasi waktu karena selamanya ia harus menjaga citra moral dalam dirinya.

Adapun indikator kompetensi kepribadian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru salah satunya kompetensi kepribadian yang tidak kalah penting dari kompetensi lainnya. Adapun indikator kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut: 1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, 2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan 5) menjunjung tinggi kode etos profesi guru.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

#### 4. Kompetensi Sosial

Pengalaman dalam kehidupan di masyarakat membuktikan bahwa guru selalu mendapat sorotan tersendiri dalam segala aspek tingkah lakunya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat memberi kedudukan yang lebih terhadap guru dan menyadarkan harapan sebagai cermin ideal pada sosok guru. Hal ini tentunya harus menjadi suatu kebanggaan bagi guru, yang dimaknai sebagai dorongan untuk mewujudkan harapan ideal tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai makhluk sosial, dorongan untuk mewujudkan harapan ideal itu dapat diejawantahkan dengan cara mengoptimalkan kompetensi sosial yang dimilikinya. Kompetensi sosial dimaknai sebagai kemampuan guru untuk bergaul dan berkomunikasi secara efektif dengan individu-individu, baik yang berada di lingkungan sekolah, seperti peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, maupun masyarakat sekitar.

Guru adalah ujung tombak pendidikan, di tangannyalah pendidikan generasi bangsa diletakkan, generasi bangsa yang harus dibawa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi yang kemudian akan membangun negeri ini. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas yang akan membawa negerinya pada kehidupan yang berkualitas, gurunya pun harus berdiri sebagai sosok-sosok yang berkualitas: yang proporsional dalam menjalankan tugasnya. Adapun indikator-indikator guru yang mempunyai kompetensi sosial adalah sebagai berikut: 1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial

ekonomi, 2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, 3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya, dan 4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Pemerintah akan mewujudkan profesionalitas guru ini dengan berbagai perbaikan hak dan kewajibannya lewat program sertifikasi. Indikator seorang guru memiliki kompetensi profesional adalah menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup 1) penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah; 2) substansi keilmuan yang menaungi materi tersebut; dan 3) penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Sementara Gary dan Margaret dalam buku Mulyasa mengatakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional yaitu guru yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a) memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, b) kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, c) memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*Feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), dan d) memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai *...descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful. ....* kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.<sup>18</sup> Sementara Charles mengemukakan bahwa: *competency as rational performance which satisfactorily mets the objective for a disired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>18</sup> *Opcit*, h. 25



tujuan yang dipersyaratkan).<sup>19</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>20</sup>

Adapun pengertian kompetensi tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) evaluasi hasil belajar, dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 2) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian mencakup yang mencakup, (a) mantab, (b) stabil, (c) dewasa, dan (d) arif dan bijaksana, (e) berwibawa, (f) berakhlak mulia, (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (h) mengevaluasi kinerja sendiri, dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- 3) Kompetensi social, merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif bersama dengan anak didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
- 4) Kompetensi professional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi: (a) konsep, struktur dan metode keilmuan, teknologi, seni yang menanungi/koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetensi secara professional dalam konyeks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.<sup>21</sup>

Sebagai pembanding dalam untuk Standar kompetensi Guru di Amerika Serikat dari *National Board for Profesional Teaching Skill*. Rumusan kompetensi tersebut dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh sertifikasi bagi Guru, dengan rumusan *What Teachers Should Know and Be Able to Do* (apa yang dapat dipikir

---

<sup>19</sup> *Opcit*, h.25

<sup>20</sup> Depdiknas, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta; Depdiknas, 2005), h. 3

<sup>21</sup> Permen No, 19 tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan nasional*

dan dilakukan Guru) yang di dalamnya terdapat terdapat lima preposisi utama yaitu:

1. *Teachers are committed to studies and their learning* (guru berkomitmen untuk siswa dan belajarnya) yang meliputi: (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, (c) perlakuan guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan (d) misi gur yang memepluas cakrawala berfikir siswa,
2. *Teachers know the subjects they teach and how to teach subject to students* (guru menagetahui materi dan untuk apa mengajarkan materi itu kepada siswa), meliputi: (a) apresiasi guru tentang pemahaman materi pelajaran yang lain, )b) kemampuan untuk menyampaikan pelajaran, dan (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (*multiple path*) .
3. *Teachers are responsible for managing and monitoring students learning* (guru responshif mengelola dan memonitoring siswa), terdiri atas: (a) penggunaan berbagai metode dalam pencapain tujuan pembelajaran, (b) menyuunn bebagai proses pembelajaran dalam berbagai stting kelompon (group setting), kemampuan untuk memebrikan ganjaran (reward) keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa secara teratur, dan (d) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.
4. *Teachersnthink systematically about their practice and learn from experience* (guru berpikir sistematis tentang praktiknya dan belajar dari pengalaman), meliputi: (a) guru secara terus menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai riset terhadap Pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran.
5. *Teachers are members of learning comunicaties* (guru adalah anggota ggota terhadap komunitas belajar, ,eliputi: (a) guru memberikan konstribusi terhadap efektivitas sekaolah melalui kolaborasi dengan kalangan professional lainnya, (b0 guru bekerja sama dengan orang tua siswa, dan (c) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat.<sup>22</sup>

Secara esensial pendapat di atas tidak menunjukkan perbedaan yang prinsip, perbedaanya hanya terletak pada cara pengengelompokkannya. Isi rincian kompetensi pedagogik dalam perspektif pemerintah, tertera dalam kompetensi profresional.

---

<sup>22</sup> Nasional Board for profesional Teaching, *Standar Kompetensi bagi Guru Amerika*, 2002), h. 3

## B. Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Seorang guru yang profesional menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kompetensi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik, kompetensi guru dibagi menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Adanya program sertifikasi guru yang dilakukan oleh pemerintah seorang guru yang sudah lulus sertifikasi dituntut untuk selalu mengembangkan keempat kompetensi tersebut untuk selalu menjaga keprofesionalannya termasuk kompetensi profesional termasuk juga guru PKn.

Upaya pengembangan profesionalisme guru tentu berlandaskan pada undang-undang yang berlaku dan tujuan serta visi dan misi yang disepakati serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia dewasa ini, tampak adanya kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar *civil effect* dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan

agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat. Pengembangan dan strategi pengembangan profesi guru harus sesuai dengan visi misi dan tujuan Pkn itu sendiri. Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi. Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi mata pelajaran ini adalah membentuk warga Negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945.

Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut: memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan, memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab, memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal tersebut sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci,

materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan anggota partai politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas tindakan kejahatan yang diketahui. Watak atau karakter kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling substantive dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi ini dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain. (Sumber tulisan: Badan Standar Nasional Pendidikan)

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan Kewarganegaraan dalam program strata satu juga merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi

professional sebagai guru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 3).

Pengembangan Profesi guru PKn melalui multi disiplin ilmu yang terintegral, terpadu dalam kurikulum di Program studi PKn, perlu peningkatan profesi guru yang dapat ditempuh dengan cara-cara berikut: 1. Peningkatan profesi melalui siaran radio pendidikan 2. Pelatihan tertulis dan Tatap muka, 3. Peningkatan profesi melalui belajar mandiri, 4. Pembinaan profesi melalui jurnal dan majalah, 5. Pembinaan profesi melalui organisasi profesi, 6. Peningkatan profesi melalui penelitian tindakan kelas, dan 7) Peningkatan Kompetensi guru pasca sertifikasi melalui pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kendala yang dialami dalam mengembangkan kompetensi profesional pasca sertifikasi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) saat ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu: (1) faktor interen yang berupa pembagian waktu dan sifat malas, (2) faktor eksteren yang berupa kebijakan sekolah dan keterbatasan informasi. Kendala yang paling sering dialami oleh guru adalah pembagian waktu antara mengajar dan mengembangkan kompetensi profesional.

### C. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan

Pelatihan merupakan proses yang mencoba memberikan informasi, keahlian dan pemahaman atau organisasi dan tujuan-tujuannya kepada karyawan. Pelatihan menyiratkan perubahan, baik dalam keahlian, pengetahuan, sikap maupun perilaku. Aktivitas pelatihan adalah program terencana dari perbaikan organisasional, dan karena itu sangat penting untuk merencanakan program pelatihan secara teliti, sebab tujuan akhirnya adalah mengkaitkan muatan pelatihan dengan perilaku-perilaku kerja yang dikehendaki. Selanjutnya pada bagian di bawah ini akan diuraikan mengenai pengertian pelatihan guru, tujuan pelatihan guru, jenis pelatihan guru, kegiatan pelatihan guru, dan hasil pelatihan guru.

#### 1. Pengertian Pelatihan Guru

Menurut Rivai bahwa pelatihan (*training*) adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan kemampuan dan keahlian pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini, dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam menjalankan tugasnya.<sup>23</sup> Sementara Lynton mengatakan pelatihan merupakan pemerolehan pengetahuan tentang pokok persoalan oleh peserta dan mengarahkan pada tindakan peorangan, mendorong timbulnya perbaikan dalam pekerjaan.<sup>24</sup> Selanjutnya Nawawi mengatakan pelatihan pada dasarnya adalah memberikan bantuan bagi para pegawai untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu ntuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan

---

<sup>23</sup> Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Untuk Perusahaan: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) h.226

<sup>24</sup> Lynton. *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*, (Jakarta: Karya Unipress, 2002) h.13

pekerjannya.<sup>25</sup> Lebih lanjut Kamilah mengataakan bahwa pelatihan merupakan proses penyuaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang pegawai dengan bidang tugasnya pada masa sekarang dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tambahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang digeluti.<sup>26</sup>

Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan biasanya berfokus pada penyediaan bagi karyawan keterampilan-keterampilan khusus yang dapat langsung terpakai untuk pelaksanaan pekerjaan dan membantu mereka mengoreksi kelentukan dalam kinerja mereka.

Menurut Muharman pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu singkat, dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.<sup>27</sup> Selanjutnya Notoatmodjo mengatakan pelatihan bagian dari pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus atau kelompok.<sup>28</sup>

Pelatihan dibedakan dengan pengembangan beberapa hal. Pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik, sedangkan pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke depan. Pelatihan mempunyai fokus yang agak sempit dan harus memberikan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori. Manfaat finansial pelatihan bagi organisasi biasanya terjadi dengan segera. Sedangkan pengembangan ditujukan pada karyawan tingkat manjerial.

---

<sup>25</sup> Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997, h.215

<sup>26</sup> Kamilah. *Manajemen Pelatihan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 9

<sup>27</sup> Muharman. *Profesional Kepala Sekolah*, (Jakarta; Depdikbud, 2004) h. 23

<sup>28</sup> Notoatmodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 33



Pengembangan mempunyai lingkup yang lebih luas, yang lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan jangka panjang yang bersifat umum dan hasilnya tidak bersifat langsung dan diukur dalam jangka panjang.

Menurut Mangkunegara bahwa pelatihan diperuntukkan pada pegawai pelaksana dan pengawas, sedangkan pengembangan untuk pegawai tingkat manajemen/pimpinan. Pendapat tersebut menjelaskan penggunaan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha terencana, yang dilakukan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan, dan sikap pegawai. Sedangkan pengembangan lebih difokuskan untuk peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia bagi manajemen tingkat atas dan tingkat menengah. Sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai tingkat bawah (pelaksana).<sup>29</sup> Untuk lebih jelasnya Mangkunegara membedakan pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan proses teknis dalam tujuan yang terbatas. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, agar pegawai manajerial dapat mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum.<sup>30</sup>

Berpijak pada pendapat di atas sangat jelas bahwa istilah pelatihan ditujukan kepada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis sedangkan pengembangan digunakan untuk pegawai tingkat manajerial dalam rangka meningkatkan kemampuan konseptual, pengambilan keputusan, dan *human relation*. Jadi segala upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>29</sup> Mangkunegara. *Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Rafika Aditama.), h. 49

<sup>30</sup> Mangkunegara. *Ibid.* h. 50

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis para guru adalah pelatihan (*training*).

Pendidikan adalah usaha pengembangan sumber daya manusia yang sangat luas jika dibandingkan dengan pelatihan. Perbandingan pendidikan ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan

Aspek	Pendidikan	Pelatihan
Pengembangan kemampuan	Menyeluruh ( <i>overall</i> )	Khusus ( <i>specific</i> )
Area kemampuan/penekanan	Kognitif, Afektif Psikomotor	Psikomotor
Jangka Waktu Pelaksanaan	Panjang ( <i>Long term</i> )	Pendek ( <i>Short Term</i> )
Materi yang diberikan	Lebih umum	Lebih khusus
Metode belajar	Konvensional	Inkonvensional
Penghargaan	Gelar ( <i>degree</i> )	Sertifikat ( <i>nondegree</i> )

Sumber: Notoatmodjo, 2000

Pengembangan (*development*) merupakan kesempatan belajar bagi individu agar dapat berkembang dalam jangka panjang. Pengembangan dapat berupa pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan interpersonal atau penilaian personaliti serta kemampuan untuk membantu pegawai menyiapkan masa depan. Meskipun antara pelatihan dengan pengembangan punya perbedaan, namun keduanya sama-sama menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam *human relation*.

Menurut Lynton bahwa ada beberapa asumsi yang mendasari konsep pelatihan guru, yaitu: 1) penguasaan pengetahuan tentang pokok persoalan oleh peserta mengarah pada tindakan, 2) peserta mempelajari apa yang diajarkan oleh penatar, 3) tindakan perorangan mendorong timbulnya perbaikan dalam pekerjaan,

dan 4) pelatihan merupakan tanggung jawab dari organisasi peserta, peserta itu sendiri, dan lembaga pelatihan.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Pelatihan Guru

Tujuan pelatihan adalah untuk mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, sehingga diperoleh peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Meldopa dalam musadad tujuan utama pelatihan dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang, yaitu: a) memperbaiki kinerja, b) memutakhirkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, c) mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya, d) membantu memecahkan permasalahan operasional, e) memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan pribadi, dan f) mempersiapkan karyawan untuk promosi.<sup>32</sup> Selanjutnya Nawawi berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan bagi pegawai adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan cara bekerja yang efektif pada masa sekarang.<sup>33</sup> Selanjutnya Handoko mengatakan bahwa pelatihan dan pendidikan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik tertentu, secara terinci dan rutin serta menyiapkan pegawai melakukan pekerjaan sekarang.<sup>34</sup> Sedangkan Wahyudi menjelaskan tujuan pendidikan dan pelatihan adalah: 1) meningkatkan produktivitas, 2) meningkatkan kualitas, 3) meningkatkan mutu perencanaan, 4) meningkatkan semangat pegawai, 5) sebagai balas jasa tidak

---

<sup>31</sup> Lynton. *Ibid*, p. 13

<sup>32</sup> Meldopa. *Ibid*, p. 236

<sup>33</sup> Nawawi, *Ibid*, h. 216

<sup>34</sup> Handoko. *Manajemen*, (Yogyakarta: Badan Penerbit UI, 2008), h. 104

langsung, 6) meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, 7) mencegah kadaluarsa, dan 8) kesempatan untuk mengembangkan diri.<sup>35</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS RI, maka tujuan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instan.
- 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemantu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintah yang baik.

Sedangkan tujuan khusus berkaitan dengan pelatihan guru menurut Nurtain sebagai berikut:

(a) peningkatan program pengajaran dan proses belajar mengajar, sehingga dapat ikut mendorong perkembangan pendidikan, (b) memperkenalkan guru dengan berbagai sumber media dan materialnya, (c) menetapkan sedikitnya empat hal-hal baru dalam pembelajaran, kompetensi, yaitu kekompetensi kemampuan akademik, kompetensi kemampuan profesional, kompetensi seni dan keterampilan teknis, dan kompetensi keterampilan kemasyarakatan, (d) belajar mengembangkan, mencoba menerapkan, menilai prosedur dan pelaksanaan praktik hal-hal baru dalam pembelajaran, (e) membekali guru secara konstan sesuai dengan perubahan-perubahan dalam pengembangan kurikulum sekolah, (f) lebih memperluas horizon pengetahuan akademik, profesional dan teknis dalam bentuk isi, metode maupun keterampilan yang harus dikuasai, dan (g) membuka kesempatan bagi guru-guru untuk mengembangkan diri sendiri secara profesional.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wahyudi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Sulita, 2006), h. 135.

<sup>36</sup> Nurtain. *Perencanaan Pelatihan*, (Jakarta: Pusdiklat Dikbud, 2005), h. 105

Lebih lanjut Nurtain mengatakan ada enam alasan diadakannya pelatihan bagi guru yaitu:

1) ledakan iptek menuntut kualitas guru yang semakin tinggi agar dapat mentransfer perkembangan pengetahuan dan teknologi kepada siswa, 2) kurikulum yang sudah distruktur perlu penjabaran apabila diterapkan dalam pembelajaran, 3) keberadaan guru pada masa lalu isolasi dan kurang berorientasi pada kebutuhan guru untuk mengembangkan profesinya secara kontinyu, 4) ide inovasi pendidikan akan berhasil jika guru merasa butuh standar prestasi yang lebih tinggi dengan demikian guru merasa ditantang oleh perkembangan kurikulum sebagai konsekuensi inovasi dan perbaikan teknologi pendidikan, 5) peningkatan siswa pada standar yang diinginkan sebagai hasil proses belajar mengajar yang berkualitas, baik dari sikap, keterampilan maupun dalam pengetahuan, dan 6) tekad pemerintah yang sudah tumbuh untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga kesempatan pelatihan bagi guru semakin terbuka.<sup>37</sup>

### 3. Manfaat Pelatihan Guru

Program pelatihan sangat bermanfaat baik bagi organisasi yang menyelenggarakan maupun bagi karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurut Simamora beberapa manfaat yang dapat dirasakan melalui kegiatan pelatihan adalah: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, 2) mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, 3) menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan, 4) memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, 5) mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, dan 6) meningkatkan pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadinya.<sup>38</sup>

Sementara itu Meldopa menjelaskan bahwa pelatihan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, maupun dalam hubungan dengan departemen SDM, intra dan antar organisasi yaitu:

---

<sup>37</sup> Op.cit,h. 105

<sup>38</sup> Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YPKN, 2006), h. 290

- 1) Manfaat untuk karyawan, antara lain: (a) membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif, (b) melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan, (c) mendorong pencapaian pengembangan diri dan percaya diri, (d) membantu karyawan mengatasi stress, frustrasi, dan konflik, (e) memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan, kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap, (f) meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan, (g) membantu karyawan mendeteksi tujuan pribadi, sementara meningkatkan keterampilan interaksi, (h) memenuhi kebutuhan personal, peserta dan pelatih, (i) memberikan nasehat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan, (j) membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan, (k) membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis dengan latihan, (l) membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru.
- 2) Manfaat untuk perusahaan meliputi: (a) mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit, (b) memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level, (c) memperbaiki moral SDM, (d) membantu karyawan untuk mengetahui yujuan perusahaan, (e) membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik, (f) mendukung otentitas, keterbukaan dan kepercayaan, (g) meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan, (h) membantu pengembangan perusahaan, dan (i) meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dengan pengetahuan perusahaan.

Sedangkan menurut Lynton bahwa manfaat hasil pelatihan sebagai berikut: (1) dapat mendukung inovasi dalam melaksanakan tugas pembelajaran,

(2) hasil pelatihan untuk hubungan pribadi dengan keorganisasian (sekolah, dinas pendidikan), dan (30 hasil pelatihan untuk memperoleh jasa-jas tambahan).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut di atas dengan jelas bahwa diselenggarakannya pelatihan bagi guru-guru mata pelajaran PKn melalui kegiatan pemberdayaan MGMP sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya. Pelatihan guru merupakan proses pengembangan dalam usaha meningkatkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, teknik, pelaksanaan tugas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kompetensi guru, dan sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan di lapangan kerja.

#### 4. Jenis Pelatihan

Ada beberapa jenis pelatihan yang biasa diselenggarakan oleh instansi-instansi. Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan termasuk pelatihan guru menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut: a. Diklat prajabatan, diklat ini merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat ini meliputi: 1) diklat prajabatan golongan I untuk PNS golongan I, 2) diklat prajabatan golongan II untuk PNS golongan II, 3) diklat prajabatan golongan III untuk PNS golongan III. CPNS wajib diikutkan dalam prajabatan selambat-lambatnya dua tahun setelah penangkatan sebagai CPNS, dan CPNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembedakan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya, b) Dilat dalam jabatan, diklat dalam jabatan ini

dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat ini meliputi: 1) diklat kepemimpinan (diklatpim), yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang struktural. Diklatpim ini terdiri dari diklatpim Tk. IV, diklatpim Tk. III dan diklatpim Tk. II, dan diklatpim Tk. I, 2) Diklat Fungsional, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing, dan 3) Diklat Teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis diklat tersebut, maka pelatihan guru termasuk diklat dalam jabatan, yaitu jenis diklat fungsional. Menurut Sahertian bahwa pelatihan guru dalam jabatan (*in service training*) pada umumnya dilakukan melalui penataran. Penataran itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) penataran penyegaran adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan guru sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat melakukan tugas sehari-hari dengan standar yang dibutuhkan, 2) penataran peningkatan kualifikasi, yaitu penataran untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal tertentu dengan standar yang dibutuhkan, 3) penataran penjenjangan, adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga memenuhi persyaratan suatu pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>39</sup>

## 5. Model-Model Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai, sehingga

---

<sup>39</sup> Sahertian. P. A & Mataheru, Frans, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.10.



berdampak terhadap peningkatan kualitas kerjanya. Ada beberapa jenis model yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan suatu pelatihan.

Menurut Gaffar menyebutkan beberapa model pelatihan yaitu:

- a. Magang, yaitu model pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengalaman praktis kepada pegawai tentang pekerjaan yang akan digelutinya.
- b. *Reskilling training*, yaitu model pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan lain dari yang pernah dikuasai pegawai, karena adanya tuntutan dan persyaratan baru bagi pegawai.
- c. Pelatihan klasikal, yaitu model pelatihan yang ditujukan untuk memberikan penyegaran wawasan dan pengetahuan kepada pegawai, agar mereka dapat meningkatkan kreativitas dan orientasi berpikir dalam pekerjaan.
- d. *Leadership training*, yaitu model pelatihan yang bertujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada pegawai agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baru baik ditinjau dari segi praktik maupun teori.
- e. *Group dynamic*, yaitu model pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu melalui berbagai kegiatan kelompok. Pengembangannya yang dimaksud meliputi: kreativitas kemampuan memecahkan masalah, menganalisis, mempengaruhi orang lain dan berkomunikasi.
- f. *Human interaction training*, yaitu model pelatihan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan komunikasi, penyesuaian diri terhadap norma kelompok, toleransi, kerja sama, dan pengertian terhadap orang lain.
- g. *Participative training*, yaitu model pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpartisipasi setiap peserta.
- h. *Snowball training* model, yaitu model pelatihan yang dipakai dalam kelompok kecil (jumlah peserta maksimal lima orang). Kelima orang ini melatih lima orang lagi, begitu seterusnya sehingga semakin lama jumlah pegawai yang dilatih semakin banyak.
- i. *Cognitive training*, yaitu model pelatihan yang menutamakan pembinaan berbagai aspek kognitif, kreativitas, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, kepemimpinan, komunikasi, kerja sama, logika, dan penguasaan wawasan.<sup>40</sup>

Berdasarkan model-model di atas, model yang sesuai dengan pelatihan bagi guru-guru PKn melalui pemberdayaan MGMP di Kota Pontianak adalah model pelatihan *reskilling training*, pelatihan klasikal, dan *leadership training*.

---

<sup>40</sup> Gaffar. F, *Pedoman Pelatihan Bagi Kepala Sekolah*, (Bandung: UPI, 2003), h.10.

#### D. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sebagai Wadah Peningkatan Kompetensi Guru

Menurut Hoyyima Khoari bahwa pembinaan guru harus berlangsung secara berkelanjutan, karena prinsip dasarnya guru merupakan *a learning person* seorang pembelajar dan guru harus belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Guru profesional yang sudah menandatangani sertifikat pendidik berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.<sup>41</sup>

Selanjutnya Hoyyima Khoari mengatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan terus menerus (*continous professional development*) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah.<sup>42</sup> Aktivitas Guru di MGMP tidak sekedar menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami oleh guru dan berbagai pengalaman mengajar antar guru, tetapi dibarengi strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.

Desain jejaring kerja (*networking*) peningkatan profesionalitas guru senantiasa berkelanjutan dengan melibatkan instansi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.

P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk tim pengembang materi pembelajaran, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, bertugas: 1) menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 2) mengembangkan model-model pembelajaran, 3) Mengembangkan modul untuk

---

<sup>41</sup> Hoyyima Khoari, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru* (Jogyakarta: Bening, 2010), h. 54

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 54

pelatihan instruktur dan guru inti, 4) memberikan pembekalan kepada instruktur pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan 5) mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan MGMP.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi guru untuk menjadi Instruktur mata pelajaran tingkat Provinsi per mata pelajaran dengan tugas: 1) menjadi narasumber dan fasilitator pada bagian MGMP, 2) mengembangkan inovasi pembelajaran untuk MGMP, dan 3) menjamin terlaksananya kegiatan MGMP.

Selanjut Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas: 1) motivator bagi guru untuk aktif dalam MGMP, 2) menjadi fasilitator pada kegiatan MGMP, 3) Mengembangkan inovasi pembelajaran, dan 4) Menjadi narasumber pada kegiatan MGMP

MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. Upaya yang serius untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, dimana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. Dalam Undang-Undang ini menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi beberapa kendala diantaranya menyangkut tentang biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Namun terpenting bagaimana cara pemerintah menghadapi

tanggapan dan tuntutan ini akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru atau tidak.

#### E. Pelaksanaan Program Pemberdayaan MGMP dan Organisasinya

Persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan MGMP adalah:

##### 1. Tingkat Provinsi

###### a. Pembentukan Panitia ;

Kepala LPMP Kalimantan Barat membentuk Panitia Penyelenggara Program Pemberdayaan MGMP (*Blockgrant*) Kalimantan Barat

###### b. Panitia menyusun perencanaan (disain) Program Pemberdayaan MGMP se Kalimantan Barat

###### c. Panitia mengadakan seleksi Calon Guru Pemandu Program Pemberdayaan MGMP SMP untuk mata pelajaran IPA dan SMA untuk mata pelajaran fisika biologi, kimia, ekonomi, geografi dan sosiologi, PKn dan mata pelajaran lainnya.

###### d. Panitia menyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pemberdayaan MGMP (*Blockgrant*) Kalimantan Barat untuk pedoman bagi Panitia Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat

###### e. Panitia menyelenggarakan Sosialisasi tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan MGMP SMP dari 14 kabupaten/kota dan SMA/SMK dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Barat.

###### f. LPMP menyelenggarakan TOT bagi Guru Pemandu Program Pemberdayaan MGMP Kab/Kota se Kalimantan Barat secara bertahap dengan pola *In-service Training* I dan II serta *On-service Training* I dan II

- g. Menilai, menyeleksi dan mengesahkan proposal yang diajukan oleh Pengurus MGMP sesuai dengan kriteria, prosedur dan mekanisme yang ditentukan.
- h. Kepala LPMP Kalimantan Barat menandatangani naskah MoU kerjasama penyelenggaraan Program Pemberdayaan MGMP antara Kepala LPMP Kalimantan Barat dengan Ketua Pengurus MGMP yang lolos seleksi proposal.
- i. Menyalurkan dana bantuan langsung (*Blockgrant*) kepada MGMP melalui rekening MGMP.
- j. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan MGMP

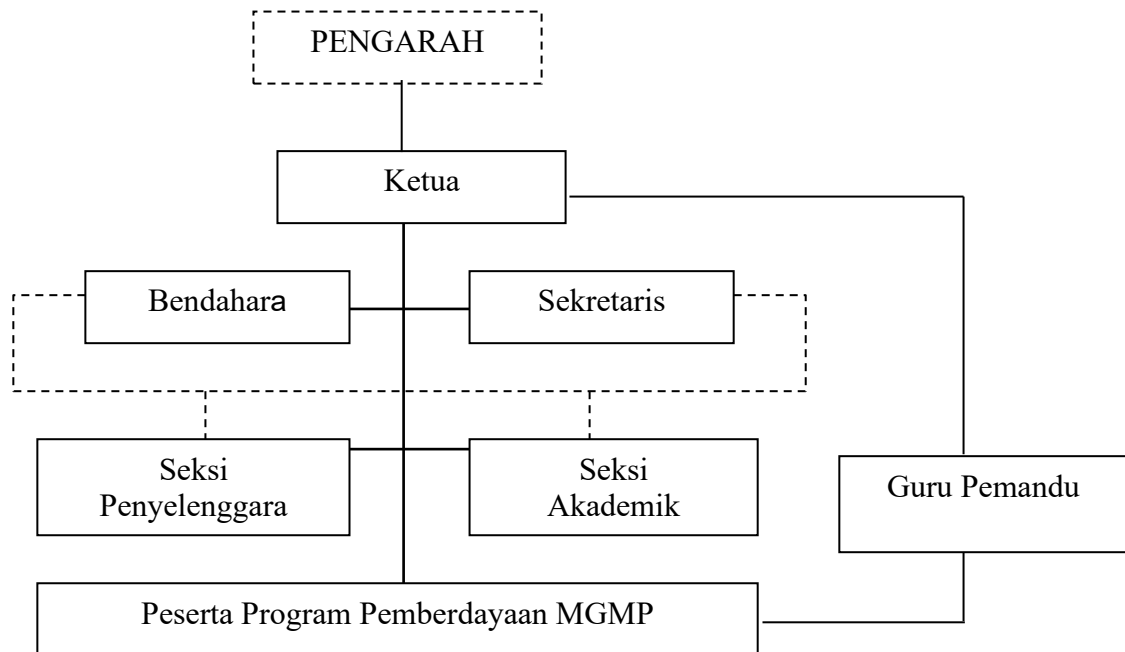
#### F. Pengelola Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Kegiatan Pemberdayaan MGMP dikelola oleh Panitia yang terdiri dari Pengurus MGMP tingkat kabupaten/rayon dan Guru Pemandu. Jumlah Guru Pemandu program sebanyak tiga (3) orang bertugas sebagai fasilitator.

##### 1. Peserta MGMP

Program Pemberdayaan MGMP diarahkan kepada guru-guru mata pelajaran sejenis. Jumlah peserta program pemberdayaan antara 15– 25 orang. Prosedur perekrutan peserta MGMP melalui pendaftaran oleh Kepala Sekolah masing-masing Calon Peserta.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan MGMP



Gambar. 1. Strukur Organisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan MGMP

3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala Cabang/UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau Pengawas atau Ketua KKKS SMP/SMA/SMK dapat dijadikan sebagai Pengarah.
4. Jumlah dan nama seksi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi MGMP setempat
5. Jumlah peserta disesuaikan dengan proporsi dan jumlah guru setempat serta mempertimbangkan kualitas dan efektifitas kegiatan

### G. Rincian Tugas Pelaksana Program Pemberdayaan MGMP

1. Ketua, tugasnya :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program, mulai dari persiapan sampai pelaporan
  - b. Mengendalikan pelaksanaan program secara umum
  - c. Menyusun dan mengajukan proposal program pemberdayaan
  - d. Menandatangani MoU kerjasama penyelenggaraan program

- e. Mencairkan dana *Blockgrant* bersama Bendahara
- f. Melakukan koordinasi dengan LPMP Kalimantan Barat, Instansi vertikal (Dinas Pendidikan Kecamatan, Kabupaten/Kota), Pengawas Tingkat SMP/SMA/SMK, KKKS dan horisontal (dengan MGMP lain)

2. Sekretaris :

- a. Menyusun perencanaan program
- b. Menyusun proposal bersama ketua
- c. Mengurusi surat menyurat
- d. Menyiapkan blanko dan format-format yang diperlukan dalam kegiatan
- e. Mengurusi arsip dan dokumentasi kegiatan (daftar hadir peserta, produk kegiatan, dan buku tamu dsb.)
- f. Menghimpun dan menyusun bahan laporan
- g. Menyediakan ATK dan Bahan yang diperlukan dalam kegiatan

3. Bendahara:

- a. Menyusun rencana pembiayaan kegiatan
- b. Mencatat serta membukukan penerimaan dan penggunaan dana
- c. Menyimpan dan mengeluarkan uang dari dana *Blockgrant*
- d. Menyiapkan blanko dan format-format yang berkaitan dengan penggunaan dana (Tanda terima transport peserta, honor nara sumber/ guru pemandu, konsumsi, dsb.)
- e. Menyimpan bukti-bukti penggunaan dana
- f. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban keuangan

4. Seksi Penyelenggara :

- a. Menyusun rencana kebutuhan fasilitas penyelenggaraan kegiatan
- b. Menyiapkan tempat dan fasilitas penunjang kegiatan lainnya

- c. Mengedarkan daftar hadir peserta dan nara sumber
- d. Mengurusi kebutuhan peserta dalam kegiatan (konsumsi, obat-obatan ringan, dsb.)

5. Seksi Akademik :

- a. Menyusun rencana kebutuhan kegiatan akademik
- b. Menyusun jadwal kegiatan
- c. Mengatur pembagian tugas guru pemandu kegiatan dan nara sumber lainnya
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang telah diprogramkan.

6. Guru Pemandu

- a. Menyusun silabus kegiatan akademik
- b. Menyiapkan rancangan kegiatan
- c. Menyiapkan materi kegiatan
- d. Menyiapkan soal *pre-post* test
- e. Memandu pelaksanaan kegiatan
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
- g. Meportofoliokan hasil kegiatan

H. Profil MGMP Mata Pelajaran PKn SMP Kota Pontianak

Profil Organisasi MGMP Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terletak di Kota Pontianak. MGMP PKn SMP letak geografisnya berada di SMP Negeri 1 Pontianak Jl. Jenderal Urip Sumiharjo Pontianak. MGMP.

1. Program Kerja

Program kerja MGMP dilaksanakan dengan prinsip dari guru, oleh guru, dan untuk guru, sehingga prinsip ini guru dapat mengembangkan pengetahuan



dan keterampilannya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang bermuara pada hasil pembelajaran yang optimal.

Pengurus MGMP PKn periode 2014-2016 bekerja untuk memulihkan kondisi organisasi yang sebelumnya mengalami kevakuman dengan berbagai upaya konsolidasi dan pengembangan program. Adapun program MGMP PKn yang dikembangkan berpedoman pada rumusan koordinasi kegiatan organisasi penunjang Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

- a. Rapat kerja dan pertemuan rutin
- b. Peningkatan kompetensi guru PKn meliputi peningkatan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
- c. Kegiatan pengembangan kemampuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran seperti: diskusi isi kurikulum, menyusun desain pembelajaran, diskusi materi pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaiannya serta workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- d. Kegiatan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperluas wawasan antara lain mengadakan seminar pendidikan, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pembuatan media pembelajaran. Pelatihan yang dilaksanakan berupa pengaplikasian media pembelajaran dalam bentuk ICT, menyiapkan guru dalam rangka mengikuti uji kompetensi UKA/UKG) dan mengadakan pendampingan dalam proses sertifikasi guru dalam jabatan.

## 2. Misi dan Misi MGMP PKn Kota Pontianak

### a. Visi

Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi organisasi dan digunakan untuk memandu perumusan misi organisasi tersebut. Visi adalah

pandangan jauh ke depan kemana MGMP Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan dibawa. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh MGMP PKn, agar organisasi ini dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut MGMP PKn SMP di kota Pontianak adalah: Unggul dalam profesi dengan kepribadian Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan visi ini semua pengurus dan anggota MGMP diharapkan memiliki kesamaan pandangan arah ke depan yang akan dilakukannya. Adapun indikator dari visi di atas sebagai berikut: 1) unggul dalam pedagogik, 2) unggul dalam kepribadian, 3) unggul dalam profesionalan 4) unggul dalam perilaku sosial, dan 5) unggul dalam kepemimpinan yang demokratis.

#### b. Misi

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan kemampuan merealisasikan visi. Oleh karena visi harus mengakomodir semua kelompok, dan kepentingan dalam organisasi. Misi juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan organisasi. Dalam mempertimbangkan misi harus mempertimbangkan tugas pokok organisasi dan kelompok kepentingan yang terkait dengan wadah MGMP PKn. Dengan kata lain misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Berdasarkan pada visi MGMP PKn yang dilengkapi indikator, segenap anggota dan pengurus di Pontianak mempunyai gambaran yang jelas tentang keberadaan MGMP di masa depan yang harus disertai dengan peningkatan dedikasi, loyalitas, finansial, dan kerjasama yang baik antar sesama anggota dan pengurus.

Adapun misi dari pada MGMP PKn Kota Pontianak sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan **pelatihan** multi metode dan media berbasis *Informan and Communication Teknologi* (ICT) serta melaksanakan bimbingan secara efektif sehingga tetap setiap anggota dan pengurus MGMP PKn SMP di kota Pontianak menguasai secara optimal sesuai dengan kebutuhan guru.
- 2) Mendorong dan membantu anggota dalam meningkatkan mutu pembelajaran PKn sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Menumbuhkan penghayatan terhadap agama, moral yang luhur sehingga menjadi sumber keakrifan dan kebijakan dalam bertindak.
- 4) Mendorong semua anggota untuk mengembangkan kemampuan diri agar menjadi guru yang profesioanl.
- 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota dan pengurus MGMP PKn di Ponianak dalam rangka menuju peningkatan kualitas pendidikan.
- 6) Menumbuhkan apresepasi dan apresiasi seni, budaya agamis menuju terbentuknya sikap dan perilaku yang santun dalam bermasyarakat.

### 3. Pemberdayaan Oganisasi MGMP PKn Kota Pontianak

Dalam pemberdayaan organisasi MGMP PKn kunci utama adalah kinerja pengurus MGMP terutama Ketua dan pengurus inti. Dalam hal ini seorang Ketua yang harus mempunyai komitmen dan visioner. Bagaimana seorang Ketua dapat menjadi sebagai penggerak utama dan promotor program kerja. Kepemimpinan seorang Ketua dituntut untuk senantiasa dapat

menggerakkan roda organisasi dengan memberdayakan seluruh potensi organisasi yang ada termasuk pengurus. Maju tidaknya MGMP merupakan tanggung jawab utama seseorang Ketua beserta anggotanya.

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus MGMP mata pelajaran PKn kota Pontianak sebagai berikut: a) menetapkan sekolah/tempat pertemuan sebagai sekretariat dan pusat pertemuan, b) melakukan pendataan anggota, 3) memberi motivasi kepada guru PKn agar mengikuti setiap kegiatan yang diadakan, 4) meningkatkan kompetensi meliputi aspek pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional serta kepemimpinan, 5) menunjang pemenuhan kebutuhan guru PKn yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran terutama menyangkut bahan ajar, media, dan metode pembelajaran PKn, 6) memberikan pelayanan informatif dan konsultatif dalam mengatasi permasalahan guru PKn dalam kegiatan pembelajaran, 7) menyebarkan informasi tentang kebijakan yang terkait dengan pengembangan PKn, dan 8) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan MGMP PKn serta menetapkan program tindak lanjut.

Secara garis besar program pemberdayaan MGMP PKn SMP Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2  
Program Pemberdayaan MGMP PKn SMP Kota Pontianak

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Wawasan Kependidikan,	Memperluas wawasan kependidikan peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta lebih memahami filosofi pendidikan</li> <li>• Peserta mamahami kebijakan pen-didikan terkini</li> <li>• Peserta mampu mengimplemen-tasikan kurikulum yang berlaku</li> </ul>
	Peningkatan Kompetensi	Menguatkan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta menguasai struktur dan standar isi materi pembelajaran</li> </ul>

2	Akademik	materi substansi/ akademik mata pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta mampu menyajikan materi bahan ajar secara konseptual dan kontekstual</li> </ul>
3	Peningkatan Kompetensi Pedagogik	Meningkatkan kemampuan peserta dalam memfasilitasi pembelajaran secara efektif dan menyenangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta menguasai model-model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan</li> <li>• Peserta mampu merancang model-model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan</li> </ul>
4	Identifikasi Masalah Pembelajaran di Kelas	Mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari di kelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah pembelajaran teridentifikasi dan terinventarisasi</li> <li>• Ada solusi pemecahan masalah</li> <li>• Peserta proaktif mengidentifikasi masalahnya sendiri</li> </ul>
5	Penguatan Manajemen Organisasi	Mengoptimalkan peran dan fungsi MGMP sebagai wadah pembinaan profesional guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program jelas, terarah, berkesinambungan dan realistis</li> <li>• Persepsi anggota positif terhadap keberadaan MGMP dan merasa memiliki</li> </ul>

#### I. Pendidikan Kewarganegaraan dan Strategi Pembelajarannya

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selanjutnya pada ayat (2) juga dikatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.<sup>43</sup>

Sementara itu pada bagian penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pernyataan yang dimuat Undang-Undang

<sup>43</sup> Murdiono. M, *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ombak, 2012), h. 33.

tersebut merupakan landasasn yuridis formal pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan di jenjang persekolahan harus memaknai bahwa persoalan kewarganegaraan bukan sekedar membahas status legas formal kewarganegaraan. Pemahaman tentang kewarganegaraan harus dimaknai secara lebih luas dan komprehensif.

Menurut Mukhamad Murdiono bahwa pemahaman tentang kewarganegaraan yang hanya menjawab pertanyaan “apa itu kewarganegaraan?” *What is Citizenship* sudah tidak lagi memadai. Pertanyaan yang harus diajukan untuk memahami persoalan kewarganegaraan yang lebih luas dan komprehensif adalah bagaimana menjawab pertanyaan “apa yang disebut kewarganegaraan?” (*what is called citizenship*).<sup>44</sup>

Sementara Murdiono mengatakan bahwa dalam membahas persoalan kewarganegaraan di era kontenporer ini, ada dua pertanyaan sentral yang diajukan yaitu: “apakah kewarganegaraan itu sebagai status atau praktik, dan “apakah kewarganegaraan itu merupakan institusi yang mengontrol atau memberdayakan?”. Kedua pertanyaan sentral tersebut harus dijawab untuk mendapatkan kajian kewarganegaraan yang mendalam dan tidak parsial.<sup>45</sup>

Kompleksnya kajian mengenai kewarganegaraan, memerlukan upaya serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya sekolah sebagai lembaga formal kultural, dalam upaya mencapai tjuan pendidikan kewarganegaraan yang hendak dicapai. Pasca reformasi pendidikan kewarganegaraan sudah menunjukkan adanya perubahan ke arah pradigma baru yang lebih mengarah ke siswa untuk berpikir kritis.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>45</sup> Isin, E.F., *Citizenship in Flux: The Figure of The Avtivist Citizen*, (Issue 29), p.367-388

Menurut Branson dalam bukunya Murdiono pendidikan kewarganegaraan seharusnya difokuskan pada tiga komponen dasar pengembangan meliputi; *civil knowledge, civil skill, and civil desposition/traits*.<sup>46</sup> Sementara Wahab dan Supriya mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan pendidikan kewarganegaraan antara lain: 1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu, 2) kurang diarahkannya pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya, 3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif, dan 4) berorientasi pada kepentingan rezim yang berkuasa. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan tidak berhasil membantuk warga negara yang demokratis. Pembelajaran yang mengekang kebebasan siswa dalam proses pembelajaran akan menjauhkan keberhasilan tujuan pembelajaran.

Selanjut Wahab dan Supriya mengatakan bahwa prinsip pembelajaran yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah bergeser dari prinsip "*what to think*" yang bersifat indoktrinasi kearah yang lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan dan jati diri serta lebih berprorientasi pada nilai-nilai demokrasi, yaitu prinsip "*how to think*".<sup>47</sup> Pada pembelajaran ini siswa dikembangkan kemampuannya untuk berpikir.

Bahan-bahan pelajaran disampaikan secara desentralistik, yang sesuai dengan semangat reformasi yang lebih menuntut kemandirian dan tidak lagi bersifat sentralistik. Dalam pendekatan kedua ini guru bukan lagi sebagai corong dari pemerintah yang sedang berkuasa. Guru bertindak sebagai tenaga pendidikan profesional yang tidak hanya sekedar melaksanakan kurikulum. Guru sebagai

---

<sup>46</sup> Branson, M.S. (Ed), *Belajar civic education dari Amaerka* (terjemahan Syafruddin, dkk.), (Yogjakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asian Foundation (TAF)).h.35

<sup>47</sup> Wahab, A.A. dan Supriya. *Teori dan Landasan Kewarganegaraan*, (Bandung: Ombak, 2012), h. 35

pengembang kurikulum memiliki pengetahuan, kemampuan kompetensi untuk dapat mendorong anak berpikir, berusaha dengan kemampuannya untuk dapat mencoba, mengemukakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dirinya untuk dapat menemukan sendiri dan melaporkannya.

Strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah strategi pembelajaran yang lebih bersifat dialogis-kritis, pengalaman langsung (*direct experiences*), kolaboratif, dan kooperatif. Strategi pembelajaran yang tergolong baru dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah strategi pembelajaran kewarganegaraan berbasis portofolio. Strategi ini dikembangkan dari project citizen yang dikembangkan oleh *Center for Civic Education (CCE) calabassar* Amerika Serikat. Strategi pembelajaran berbasis portofolio mengembangkan berbagai kemampuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mendukung seorang siswa menjadi warga negara yang baik. Strategi pembelajaran berbasis portofolio memiliki beberapa karakteristik penting yang diperlukan dalam upaya pembentukan warga negara yang baik, yaitu dalam strategi ini 1) siswa diajak untuk belajar dan berlatih berpikir kritis, 2) strategi ini membawa siswa untuk mengenal, memilih, dan memecahkan masalah yang ada di lingkungannya, 3) strategi pembelajaran portofolio mengajak siswa untuk berpikir dengan menggunakan metode ilmiah, dan 4) melalui strategi ini siswa dikembangkan kemampuan sosial lainnya yang sejalan dengan inkuiri.

Menurut Murdiono bahwa strategi pembelajaran portofolio melatih dan mengajak siswa untuk berpikir dengan menggunakan metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah dalam pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang menantang dan mengembangkan berpikir ilmiah. Metode ini mengembangkan prinsip *student active learning*. Siswa dilatih untuk bertanya, menemukan, dan



memecahkan masalah.<sup>48</sup> Ringkasnya, melalui strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis portofolio setidaknya dikembangkan tiga kemampuan dasar yang meliputi: kemampuan melakukan investigasi (*investigation*), kemampuan berpartisipasi (*participation*).

#### A. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan struktur keilmuan mata pelajaran. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga Negara. Misi mata pelajaran PKn adalah membentuk warga negara yangt baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut:

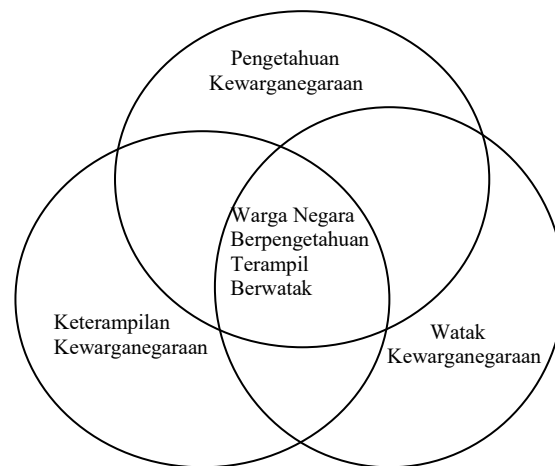
1. Memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
3. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun struktur keilmuan mata pelajaran pada umumnya mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai (*Values*). Sejalan dengan hal tersebut telah berkembang wacana tentang Pendidikan Kewarganegaraan paradigma

---

<sup>48</sup> Murdiono, *Op cit*, h. 39

baru (*new civic education*) yang menyatakan bahwa struktur keilmuan mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Cukupan dimensi dalam struktur keilmuan mata pelajaran PKn dapat digambarkan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Dimensi Keilmuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Secara garis besar, dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang tercakup dalam pelajaran PKn meliputi: politik dan moral. Dengan demikian pelajaran PKn merupakan kajian antar disiplin. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intelektuan skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dalam pengembangan Silabus KBK SMP, dikatakan keterampilan intelektual dicontohkan adalah keterampilan merespon berbagai

persoalan politik, seperti perlu tidaknya kampanye secara massal sedangkan keterampilan berpartisipasi contohnya adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, seperti perlu tidaknya melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.<sup>49</sup>

Watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling sub tantib dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak/karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ditandai dengan memberikan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap hal-hal lain yang bersifat afektif.<sup>50</sup> Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipasif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan itu akan dibentuk suatu watak atau karakter yang mapan. Sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghaormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangssan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat diperlukan bagi pengembang silabus dan rencana pembelajaran. Sasaran mata pelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang bangga berbangsa dan cinta terhadap tanah air dengan dimensi materi keilmuannya meliputi politik, hukum dan moral, keterampilan dan watak kewarganegaraan. Ide pokok mata pelajaran PKn ingin membentuk warga negara

---

<sup>49</sup> Depdiknas, *Pedoman Khusus pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi SMP* (Depdiknas, 2005) hal. 251

<sup>50</sup> Depdiknas, *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup*, Tim Broad Based Education(Jakarta: Depdiknas), 2002

Indonesia yang baik yaitu warga negara yang dapat menjalankan perannya dalam hubungannya sesama warga negara dan hubungannya dengan negara sesuai ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

Pembelajaran menjawab pertanyaan (1) apa yang diajarkan standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pelajaran; (2) Bagaimana cara mengajarkannya (pengalaman belajar, metode, dan media); (3) Bagaimana dapat diketahui bahwa standar kompetensi telah tercapai (evaluasi/sistem pengujian). Penyusunan silabus merupakan salah satu tahapan pengembangan kurikulum, khususnya menjawab pertanyaan “apa yang akan diajarkan?” Silabus merupakan hasil atau produk kegiatan pengembangan desain pembelajaran. Hasil pengembangan desain pembelajaran disebut silabus. Komponen silabus sebagai salah satu hasil pengembangan kurikulum terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar siswa, alokasi waktu, dan sumber bahan.

Adapun struktur keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3.

Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

No	Dimensi	Bidang Kajian
1	Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia sebagai <i>zoon politikon</i> (makhluk sosial)</li> <li>2. Proses terbentuknya masyarakat politik</li> <li>3. Proses terbentuknya bangsa</li> <li>4. Asal-usul negara</li> <li>5. Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk negara</li> <li>6. Kewarganegaraan</li> <li>7. Lembaga politik</li> <li>8. Model-model sistem politik</li> <li>9. Lembaga-lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara</li> <li>10. Demokrasi Pancasila</li> <li>11. Indonesia dalam hubungan internasional</li> </ol>
2	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rule of law</i> (Negara Hukum)</li> <li>2. Konstitusi</li> </ol>

<sup>51</sup> Sukadi, *Pengelolaan Pembelajaran Mata Pelajaran Kewarganegaraan*(Tesis, PPS UM, 2005) h.19

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem hukum</li> <li>4. Sumber hukum</li> <li>5. Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum dan sanksi hukum</li> <li>6. Pembidangan hukum</li> <li>7. Proses hukum</li> <li>8. Peradilan</li> </ol>
3	Moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian nilai, norma, dan moral</li> <li>2. Hubungan antar nilai, norma dan moral</li> <li>3. Sumber-sumber ajaran moral</li> <li>4. Norma-norma dalam masyarakat</li> <li>5. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila</li> </ol>
4	Keterampilan dan watak Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan keterampilan intelektual kewarganegaraan</li> <li>2. Pengembangan keterampilan posisi diri</li> <li>3. Pengembangan keterampilan partisipasi</li> <li>4. pengembangan watak kewarganegaraan</li> </ol>

## B. Karakteristik Peserta Didik dalam Pembelajaran PKn

### 1. Pengembangan Aspek Kognitif

Aspek kognitif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan pengetahuan. Aspek ini meliputi enam jenjang, yaitu (1) pengetahuan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*), (3) penerapan (*aplication*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesis (*syntesis*), dan (6) evaluasi (*evaluation*). Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan aspek ini analog dengan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic konowledge*).

Aspek kognitif adalah suatu ranah atau kawasan yang merupakan “pintu pertama” memasuki kawasan psikomotorik maupun afektif. Seseorang siswa dapat membangun aspek psikomotorik dan afektifnya dengan baik apabila berbekal dengan kemampuan kognitif yang baik. Pengembangan kemampuan siswa tidak cukup dan tidak boleh berhenti pada kognitif saja, apa;agi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kritik yang kerap kali muncul terhadap hasil pembelajaran atau pengembangan kompetensi siswa dalam mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan selama ini masih kuatnya penekanan pada aspek kognitif. Lebih memprihantinkan lagi apabila kemampuan kognitif tersebut pada jenjang yang rendah, misalnya pada jenjang pengetahuan yang berupa kemampuan dalam menyebutkan atau mengingat fakta, sehingga bersifat verbalistik. Jika mengacu pada teori Piaget, anak-anak pada usia 11-12 tahun seusia anak-anak menjelang memasuki jenjang SMP, mereka sudah mampu berfikir abstrak.

## 2. Perkembangan Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan keterampilan melakukan rangkaian gerak-gerak secara sistematis. Aspek ini meliputi tujuh jenjang, yaitu: (1) persepsi (*perception*), (2) kesiapan (*set*), (3) gerakan terbimbing (*guided response*), (4) gerakan yang terbiasa (*mechanical response*), (5) gerakan yang kompleks (*complex response*), (6) penyesuaian pola gerak (*adjustment*), dan (7) kreativitas (*creativity*). Dalam konsep mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic skills*).

Dalam keterampilan kewarganegaraan dikenal adanya keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participatory skills*). Keterampilan pada jenjang pertama dan kedua kiranya dapat dikategorikan sebagai keterampilan intelektual. Keterampilan pada jenjang ketiga dan seterusnya kiranya dapat dikategorikan pada keterampilan partisipasi. Namun demikian, keterampilan partisipasi tersebut tentu sangat ditentukan oleh keterampilan intelektualnya. Terlebih-lebih pada jenjang ke tujuh atau jenjang kreativitas, di sini peranan keterampilan intelektual sangat menentukan.

Untuk pengembangan keterampilan kewarganegaraan para siswa SMP kiranya dapat dikembangkan keterampilan intelektual maupun keterampilan intelektual berpartisipasi pada ketujuh jenjang psikomotorik tersebut. Untuk pengembangan

aspek ini, program pembelajaran dan evaluasinya kiranya perlu diintegrasikan dengan persoalan-persoalan sosial atau lingkungan sekitar, termasuk persoalan global.

### 3. Perkembangan Aspek Afektif

Aspek afektif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan perasaan, sikap, dan penghayatan terhadap nilai-nilai. Aspek ini meliputi lima jenjang, yaitu: (1) penerimaan (*receiving*), (2) partisipasi (*responding*), (3) penghayatan nilai-nilai/penentuan sikap (*valuing*), (4) organisasi (*organization*), dan (5) pembentukan pola hidup (*characterization by a value or value complex*). Dalam konsep mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, aspek ini analog dengan dimensi watak/karakter kewarganegaraan. (*civic dispositions*). Pengembangan aspek afektif atau dimensi watak/karakter kewarganegaraan merupakan hal yang paling substantif dalam tujuan pembelajaran Kewarganegaraan. Kompetensi siswa yang harus dimiliki pada akhirnya harus mengarah pada terbentuknya watak/karakter kewarganegaraan. Itulah sebabnya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan sering disebut sebagai pendidikan afektif dan pendidikan moral atau pendidikan watak.

Pengembangan aspek watak/karakter Kewarganegaraan pada jenjang SMP kiranya menempati posisi strategis dibanding jenjang-jenjang pendidikan yang lain, baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan tinggi. Jenjang SMP merupakan jenjang pendidikan dasar yang bersifat fundamental, akan tetapi kemampuan berfikirnya sudah lebih berkembang dibanding siswa SD. Sebagai contoh dengan berpacu dengan teori Piaget, kesadaran terhadap peraturan didasari oleh pemahaman bahwa peraturan merupakan kesepakatan bersama yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Dibandingkan dengan jenjang SMA maupun Perguruan Tinggi, dunia afeksi dan

perasaan anak-anak seusia SMP kiranya relatif masih lebih bersih, relatif bebas dari kepentingan, motif-motif pribadi dan lain-lain. Kondisi psikologis seperti itu kiranya merupakan “lahan subur” untuk menanamkan nilai-nilai dan menumbuhkan sikap-sikap.

### C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

#### 1. Pengertian Standar Kompetensi

Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat penguasaan yang diharapkan dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut *Center for Civics Education*: Standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu standar isi (*content standard*), dan standar penampilan (*performance standard*).<sup>52</sup> Standar kompetensi yang dimaksud menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Sedangkan standar kompetensi yang menyangkut keterampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap standar isi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi memiliki dua penafsiran, yaitu: (1) pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui siswa dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu bidang studi, dan (2) spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian.

Pengembangan standar kompetensi dilakukan oleh Depdiknas melalui Balitbang bekerjasama dengan pakar bidang studi dan pakar pendidikan dari berbagai Perguruan Tinggi. Standar kompetensi tersebut telah divalidasi di lapangan dan direvisi sesuai hasil ujicoba. Kurikulum yang disusun, yang dikenal sebagai

---

<sup>52</sup> Depdiknas, *Center for Civics Education* (Jakarta: 1997) p. 2



Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), berisi bahan pelajaran yang mengacu pada standar kompetensi diberikan kepada siswa melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mencakup materi, strategi, media, evaluasi, dan sumber atau bahan pembelajaran.

## 2. Penentuan Standar Kompetensi

Standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dikembangkan dari struktur keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan di SMP, perkembangan peserta didik (pembelajar), dan kesinambungannya dengan standar Kompetensi mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun kompetensi atau tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan standar kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Berkenan dengan aspek afektif, siswa memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing yang tercermin dalam perilaku sehari-hari; memiliki nilai-nilai etika dan estetika, serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari; memiliki sikap demokratis, toleransi, dan rasa kemanusiaan (humanis), serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam ;ingkungan nasional maupun global.
- 2) Berkenan dengan aspek kognitif, menguasai ilmu teknologi, dan kemampuan akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- 3) Berkenan dengan aspek psikomotorik, memiliki keterampilan berkomunikasi, kecakapan hidup, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam, baik lokal, regional, maupun global.

Di samping mengacu pada standar kompetensi tamatan, standar kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mengacu kepada struktur keilmuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan pada standar kompetensi tersebut Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMP dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.  
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP

No	STANDAR KOMPETENSI
1	Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam era otonomi, peraturan perundang-undangan nasional, instrumen nasional HAM, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, serta merekomendasikan peristiwa proklamasi kemerdekaan dan perumusan konstitusi yang pertama.
2	Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang kedaulatan rakyat dan sistem politik, budaya demokrasi, keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi negara lain, konflik kepentingan antar bangsa dan lembaga internasional.
3	Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang pembelaan negara, sistem hukum dan peradilan nasional, instrumen internasional HAM, perlindungan hukum serta konstitusi yang pernah digunakan Indonesia.

Selanjutnya standar lulusan untuk mata pelajaran PKn di SMP dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5  
Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs Sederajat

No	Materi	Kompetensi yang Diujikan	Bentuk Penilaian
1	Ketaqwaan	Mengidentifikasi perilaku yang didasari iman dan taqwa dalam kehidupan keluarga, dan masyarakat	Tes tertulis
2	Cinta Tanah Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyimpulkan makna kesatuan wilayah Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya</li> </ul>	Tes tertulis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi sikap dan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>	
3	Bekerja Keras	Mendeskkripsikan perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
4	Tenggang Rasa	Mengidentifikasi perilaku tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Tes tertulis
5	Gotong Royong	Mengidentifikasi, sikap bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
6	Persamaan Derajat	Mengidentifikasi harkat, derajat, dan martabat manusia menurut agama, hukum, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
7	Persatuan dan Kesatuan	Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara	Tes tertulis
8	Rela Berkorban	Menjelaskan perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
9	Keyakinan	Mendeskrripsikan tentang jaminan Pancasila dan UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah	Tes tertulis
10	Kesadaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang berlaku dalam negara RI</li> <li>• Menyimpulkan makna pentingnya kesadaran hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan</li> <li>• Mengidentifikasi keanegaraman budaya daerah yang merupakan unsur kebudayaan nasional</li> <li>• Mengidentifikasi makna jenis lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat</li> </ul>	Tes tertulis
11	Kesederhanaan	mengidentifikasi makna/bentuk hidup sederhana dalam kehidupan bermasyarakat dan beregara	Tes tertulis
12	Kerjasama	Mendeskrripsikan hidup rukun dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Tes tertulis
13	Kesetiaan	Mendeskrripsikan ciri-ciri sikap dalam	Tes tertulis

		perbuatan setia terhadap bangsa dan bernegara	
14	Kebersihan	Mengidentifikasi aturan-aturan hidup bersih menurut agama, budaya, dan hukum	Tes tertulis
15	Harga Diri	Mengidentifikasi perilaku menjaga harga diri dan kehormatan	Tes tertulis
16	Kedisiplinan	Mengidentifikasi sikap disiplin diri, disiplin sosial, dan disiplin nasional	Tes tertulis
17	Pengendalian Diri	Mengidentifikasi perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
18	Ketaatan	Mengidentifikasi perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku	Tes tertulis
19	Kepedulian	Mengdeskripsikan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 dan peraturan yang berlaku	Tes tertulis
20	Kepatuhan	Menjelaskan perilaku patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari	Tes tertulis
21	Keadilan	Mendeskrripsikan aspek kegiatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Tes tertulis
22	Kerukunan	Mendeskrripsikan kegiatan yang mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama	Tes tertulis
23	Kedaulatan	Menyimpulkan pengertian/jenis/prinsip kedaulatan yang dianut negara RI	Tes tertulis
24	Kesanggupan	Mendeskrripsikan bentuk kesanggupan diri berperan serta dalam pembangunan	Tes tertulis
25	Pengaturan	Mengidentifikasi arti/makna/kegiatan berperan serta dalam pelaksanaan pemilihan umum	Tes tertulis
26	Hormat menghormati	Menjelaskan arti/makna/peran serta warga dalam melaksanakan demokrasi ekonomi	Tes tertulis

### 3. Penentuan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PKn

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dari Standar Kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP. Standar Kompetensi dikembangkan menjadi beberapa

Kompetensi Dasar yang mencerminkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik. Dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, Kompetensi Dasar tersebut menggambarkan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak/karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kompetensi dasar merupakan perincian lebih lanjut dari Standar Kompetensi. Perincian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis atau merinci Standar Kompetensi dengan menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan jenis Kompetensi Dasarnya. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan prosedural dan pendekatan hirarkis. Pendekatan prosedural digunakan jika antara Kompetensi Dasar yang satu dengan Kompetensi Dasar yang lain merupakan hubungan yang bersifat prosedural, seperti langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Pendekatan hirarkis jika antara kompetensi yang satu dengan kompetensi dasar yang lain bersifat hirarkis, artinya sebelum menguasai suatu Kompetensi Dasar, maka Kompetensi Dasar lainnya yang merupakan prasyarat harus dikuasai dulu.

#### D. Format dan Kemasan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu tahapan untuk menerapkan Pendidikan berbasis kompetensi adalah pengembangan silabus mata pelajaran. Silabus diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Adapun konsep pengembangan silabus di sini juga disebut silabus berbasis kompetensi, artinya acuan yang digunakan untuk mengembangkan silabus, demikian pula sistem pengujiannya, tidak lain adalah Standar Kompetensi. Silabus Standar kompetensi merupakan pengembangan Standar Kompetensi menjadi kompetensi Dasar, materi pembelajaran, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Kompetensi Dasar yang dijabarkan dari standar

kompetensi sebagaimana dikemukakan di atas adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa sebagai hasil pembelajaran.

Menurut McAshan Pembelajaran berbasis kompetensi adalah program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem penyampaian, dan indikator penyampaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai<sup>53</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa komponen pembelajaran berbasis kompetensi meliputi: (1) kompetensi yang akan dicapai; (2) strategi penyampaian untuk mencapai kompetensi; (3) sistem evaluasi atau pengujian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi.<sup>54</sup>

Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Perumusan dimaksud hendaknya didasarkan prinsip relevansi dan konsistensi antara kompetensi dengan materi yang dipelajari, waktu yang tersedia, dan kegiatan serta lingkungan belajar yang digunakan. Menurut Bratton, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan perumusan kompetensi yang jelas dan spesifik, antara lain dengan melaksanakan analisis kebutuhan, analisis tugas, analisis kompetensi, penilaian oleh profesi dan pendapat ahli bidang studi (pakar), dengan pendekatan teoritik, dan telaah buku teks yang relevan dengan materi yang dipelajari<sup>55</sup>. Dengan dirumuskannya kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan siswa, maka dalam kegiatan pembelajaran akan terhindar dari mata pelajaran yang tidak diperlukan untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi.

Berdasarkan uraian di atas, silabus perlu disusun sebagai pedoman dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran berupa satuan pembelajaran. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau

---

<sup>53</sup> M.cAshan, *Competency-Based Education and Behavioral Objectives*(New Jersey: Education Technology Publications, Engelwood Cliffs) p. 261

<sup>54</sup> *Ibid*, p. 261

<sup>55</sup> Bratton, Barry, *Professional Competencies and Certification in the Instructional Technology Field*(Colorado: Englewood Cliffs, Inco) p. 263

materi pelajaran. Menurut Salim, Istilah Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan Kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar<sup>56</sup>.

Pendidikan PKn mempunyai tujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PKn di SMP memberikan bekal kepada siswa agar dapat memiliki nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari dan menanamkan agar peserta didik cinta kepada tanah airnya.

## E. Konsep Pembelajaran

### 1. Hakikat Pembelajaran PKn

Menurut Degeng pembelajaran adalah sebagai upaya untuk membelajarkan pembelajar<sup>57</sup>. Pebelajar berusaha membantu agar siswa (pembelajar) belajar lebih terarah, lebih lancar, lebih mudah dan berhasil. Dalam definisi pembelajaran yang dikemukakan Degeng memiliki makna bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode/strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan atau dimaknai bahwa pembelajaran lebih memfokuskan pada bagaimana membelajarkan pembelajar (siswa)<sup>58</sup>. Depdiknas mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik (pembelajar) yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat

---

<sup>56</sup> Salim, Peter. *The contemporary English-Indonesia Dictionary*(Jakarta: Modern English Press) p. 98

<sup>57</sup> Degeng, *Strategi Pembelajaran Mengorganisasikan Isi dengan Model Elaborasi*(IKIP Malang, IKBPI) h. 1

<sup>58</sup> Reigeluth, *Instructional Design Theories and Models A New Paradigma of Instructional Theory*(Mahwah, NL USA: Lawrence Erlbun Associates, Inc) p.5

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.<sup>59</sup> Dengan demikian, jika pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka berarti pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran (misalnya layanan pembelajaran remedial bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar). Sebaliknya, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut dimulai dengan merencanakan program pembelajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar (*lesson plan*) berikut penyediaan perangkat kelengkapannya antara lain berupa alat peraga, dan alat-alat evaluasi (misalnya soal-soal formatif). Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk membaca buku-buku atau media cetak lainnya yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan disajikan kepada para siswa dan mengecek jumlah dan keberfungsian alat peraga yang akan digunakan. Setelah persiapan tersebut dilakukan secara matang, guru melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, struktur dan situasi pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru yang bersangkutan, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Jadi semua ini akan menentukan misalnya, penyajian secara *ekspositori* ataukah *inkuiri*, atau *discovery*. Selain itu, juga perlu diperhatikan

---

<sup>59</sup> Depdiknas, *Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*, (Dikdasmen Direktorat Pendidikan TK dan SD, SEQIP), h.7



apakah situasi atau iklim pembelajarannya bersifat *joyful* ataukah menegangkan, atau bahkan menakutkan. Situasi kelasnya apakah bersifat permisif ataukah demokratis, atau sebaliknya siswa-siswa merasa tercekam akibat sikap guru yang otoriter.

Setelah kegiatan pembelajaran tersebut di atas selesai dilaksanakan termasuk, evaluasi formatif, apabila guru itu adalah guru yang baik, ia akan menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk *enrichment* (pengayaan), dapat pula berupa pemberian layanan *Remedial Teaching* bagi anak yang berkesulitan belajar. Kegiatan tindak lanjut ini sangat penting agar setiap individu pembelajaran dapat mencapai perkembangan yang harmonis dan optimal. Hal ini berkaitan erat dengan pembinaan kualitas SDM sejak dini, dan kelasnyapun menjadi ‘sehat’ dan dinamis karena tertanganinya kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh satu atau beberapa orang siswanya.

Sementara itu, sesuai dengan makna pembelajaran ini, hendaknya guru berupaya memotivasi dan membimbing siswa-siswanya untuk belajar mengenai bagaimana belajar (*learning how to learn*). Apabila siswa telah memahami dan mempraktikkannya dengan sungguh-sungguh, kelak mereka diharapkan akan mampu menjadi orang-orang yang efektif, produktif, efisien, dan kuat. Kesimpulannya, melalui belajar bagaimana belajar, pada gilirannya mereka akan berupaya membelajarkan diri mereka sendiri. Jika hal ini terjadi jembatan emas ke masa depan yang gemilang dan bermakna telah mulai terbentang.

## 2. Pendekatan, Strategi dan Model Pembelajaran

### a. Pengertian Pendekatan, strategi, dan Model

Pendekatan (*approach*) dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (misalnya dasar filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis), yang terarah secara sistematis pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pola tindakan tersebut di bangun di atas prinsip-prinsip yang telah terbukti kebenarannya sehingga tindakan-tindakan yang diorganisir dapat berjalan secara konsisten ke arah tercapainya tujuan atau teratasinya suatu masalah.

Berdasarkan pengertian di atas, pendekatan mengandung sejumlah komponen atau unsur, yaitu tujuan, pola tindakan, metode atau teknik, sumber-sumber yang digunakan, dan prinsip-prinsip.

Sementara itu, strategi adalah suatu istilah yang diadopsi dari bidang kemiliteran ke dalam bidang industri kemudian ke dalam bidang pendidikan. Strategi dapat didefinisikan sebagai perpaduan secara keseluruhan dan pengorganisasian secara kronologis dari metode-metode dan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Phillips and Owens, strategi adalah serangkaian tindakan yang bertalian secara konsisten dan tindakan-tindakan tersebut secara konseptual terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dari dua pengertian tersebut memperlihatkan bahwa strategi sama atau sama dengan *approach* (pendekatan). Yang membedakannya hanyalah prinsip-prinsip yang dilandasinya.

Pengertian "*model*." Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan (replika) dari benda yang sesungguhnya (misalnya model kerangka manusia, model jembatan layang), sehingga memiliki bentuk atau konstruksi atau sifat-sifat lain yang sama atau mirip dengan benda yang dibuatkan tiruannya atau contohnya. Model juga dapat ditafsirkan sebagai suatu contoh konseptual atau

prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan, sebagai contoh: model satuan pembelajaran, model persiapan mengajar, model-model pengajaran atau pembelajaran, model pengembangan profesional (*professional development*), dan model-model pembangunan yang digunakan di suatu negara.

#### b. Pengertian Pendekatan, Strategi, dan Model Pembelajaran

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, istilah pendekatan dan istilah strategi sering diartikan sama dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, istilah yang akan digunakan dalam uraian ini yaitu strategi pembelajaran.

Berkaitan dengan itu Raka Joni berpendapat bahwa strategi adalah pola umum perbuatan guru-siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi belajar mengajar berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama oleh guru dan siswa. Dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran.<sup>60</sup>

Pendapat lain mengenai istilah tersebut dikemukakan oleh Gerlach dan Ely bahwa strategi instruksional adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan siswa-siswa. Lebih lanjut dikatakan bahwa strategi instruksional mencakup praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendekatan sistem pembelajaran yang meliputi sifat, ruang lingkup, dan urutan peristiwa yang memberikan pengalaman-

---

<sup>60</sup> Depdiknas, *Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar* (Jakarta, Dikdasmen Ditjen TK dan SD Bagian Proyek Peningkatan Mutu Pelajaran IPA(SEQIP), 2003), h. 9

pengalaman pendidikan. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa strategi pembelajaran dapat dirumuskan sebagai suatu pola umum pembelajaran subyek didik atau pembelajar yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar subyek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

#### F. Komponen-komponen Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran bermacam-macam, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dick and Carey mengemukakan komponen-komponen strategi pembelajaran meliputi: 1) kegiatan pre-instruksional, 2) penyampaian informasi, 3) partisipasi siswa, 4) tes, dan 5) kegiatan tindak lanjut.<sup>61</sup> Kelima komponen strategi pembelajaran tersebut berbeda dari apa yang dikemukakan oleh ahli lainnya. Menurut Atwi Suparman bahwa strategi instruksional meliputi komponen: a) urutan kegiatan instruksional, yaitu suatu kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran aktual yang terentang dari tahap pendahuluan ke tahap penyajian/kegiatan inti sampai ke tahap penutup, b) metode instruksional, yaitu cara guru mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru mengorganisir siswa atau kelas, dan penggunaan media instruksional pada setiap tahap pembelajaran c) media instruksional, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan guru dan siswa pada setiap tahap kegiatan pembelajaran, dan d) waktu, yaitu alokasi

---

<sup>61</sup> Dick and Carey, *Ibid.* h. 10

waktu yang digunakan bersama oleh guru dan siswa dalam menyelesaikan kegiatan pada setiap tahap pembelajaran.<sup>62</sup>

### 1. Ragam Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran bermacam-macam dan diantara strategi itu tidak ada satupun yang paling efektif untuk mencapai semua ragam tujuan pembelajaran. Ada beberapa ahli mengklasifikasikan tentang strategi pembelajaran. Gerlach dan Ely mengungkapkan adanya dua jenis strategi pembelajaran, yaitu *expository approach* dan *inquiry approach*. Metode *expository* biasanya digunakan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada siswa melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Setelah itu guru mengecek penerimaan, ingatan, dan pemahaman siswa-siswa mengenai informasi yang telah diterimanya. Guru dapat mengulangi penjelasannya, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk untuk praktik penerapan konsep atau prinsip yang telah dijelaskan pada serangkaian contoh. Metode yang paling sering digunakan pada strategi ini adalah metode ceramah, yang didukung dengan tanya jawab dan demonstrasi. Sebaliknya melalui strategi inkuiri siswa-siswa didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh sebab itu, metode-metode eksperimen, diskusi kelompok kecil, pemecahan masalah, dan tanya jawab sangat populer penggunaannya dalam strategi ini. Sementara Raka Joni mengelompokkan strategi Belajar Mengajar sebagai berikut: 1) strategi belajar mengajar dilihat dari segi pengalaman guru, 2) strategi belajar mengajar dari pengorganisasian guru dalam pelaksanaan pembelajaran, 3) strategi belajar mengajar dilihat dari segi pengorganisasian siswa, 4) strategi

---

<sup>62</sup> Dick and Carey, *Op cit.* h. 11

belajar mengajar dilihat dari segi pola penyajian materi, dan 5) strategi belajar mengajar dari segi proses pengelolaan pesan.

## 2. Model Pembelajaran

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli. Bahkan beberapa orang guru telah mencoba mengembangkannya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Joyce dan Weil mengklasifikasikan model pembelajaran sebagai berikut: "1) *social interaction models* (model interaksi sosial), 2) *information processing models* (model-model pemrosesan informasi), 3) *personal models* (model-model pribadi), 4) *behavior modification models* (model-model modifikasi tingkah laku).

Sedangkan Adrienne Bank, Marlene Henerson dan Laurel Eu membagi 5 (lima) model pembelajaran dalam konteks perencanaan program yaitu:

### a. *Concept Analysis Model* (model analisis konsep)

Model ini digunakan untuk membelajarkan siswa mengenai bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa siswa-siswa harus mempelajari semua konsep dasar yang terkandung dalam suatu mata pelajaran dan mereka harus diberi kesempatan praktik yang terarah mengenai klasifikasi dan diskriminasi. Agar guru-guru dapat menggunakan model ini dengan berhasil, maka guru harus mampu: 1) memilih konsep-konsep berkaitan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, yang sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan siswa-siswa, 2) menganalisis konsep tersebut untuk menentukan kadar dan jenis kesulitan; 3) memantau pemahaman siswa-siswa mengenai masing-masing konsep; 4) mengatur waktu pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip belajar dan teori perkembangan yang telah diterima.

Adapun langkah-langkah pokok penggunaan model ini yaitu:

- (a) memilih dan menelaah konsep-konsep yang akan diajarkan;
- (b) mengembangkan dan menggunakan strategi-strategi yang tepat dan materi yang berhubungan; dan
- (c) mengembangkan dan menggunakan prosedur penilaian yang tepat.

Model ini menekankan pada isi mata pelajaran dan proses informasi. Model ini paling cocok untuk mata pelajaran IPS, Matematika, dan IPA, tetapi pada dasarnya dapat digunakan untuk sebagian besar pelajaran yang ada dikurikulum. Model ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran anak-anak di TK hingga siswa-siswa SMP.

b. *Creative Thinking Model* (Model Berpikir Kreatif)

Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinalitas yang digunakan siswa-siswa untuk mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan-perasaan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa siswa-siswa dapat dan harus mempelajari teknik-teknik yang menstimulus kreativitas mereka. Suasana kelas harus kondusif bagi adanya respons-respons yang berbeda agar respons yang berbeda-beda tersebut teknik kreatif diharapkan akan dapat memanfaatkannya secara efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam mata pelajaran tertentu.

Agar guru berhasil dalam menggunakan model ini, maka mereka harus mampu:

- (1) membangun suasana yang memungkinkan diterimanya semua ide atau pendapat, yang tidak hanya karena bermanfaat untuk saat it saja, tetapi

juga karena keaslian ide-ide dari siswa serta potensi mereka untuk menjuke ide-ide dan arah baru;

- (2) membantu siswa-siswa agar menyadari kekurangan-kekurangan dan kesenjangan pada penjelasan-penjelasan dan keyakinan-keyakinan yang biasa terjadi;
- (3) membantu siswa-siswa agar menjadi lebih terbuka dan lebih peka terhadap lingkungan mereka;
- (4) menjamin tiadanya suasana yang formal atau seperti sedang dites, yang biasanya dapat mengganggu kreativitas dan berpikir orisinil siswa;
- (5) memberikan stimulus (rangsangan) yang akan menawarkan praktik untuk berpikir yang jernih.

Langkah-langkah pokok dalam menggunakan model ini sebagai berikut:

- (a) membangun suatu suasana yang dapat membna berpikir kreatif;
- (b) mengajar siswa-siswa untuk menggunakan teknik-teknik yang menuju ke arah ide-ide da produk-produk baru;
- (c) mengevaluasi dan mengetes ide-ide yang telah ditawarkan.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa model ini menitikberatkan pada pemrosesan informasi dan keterampilan-keterampilan pertumbuhan pribadi.

### c. *Experiential Learning Model* (Model Belajar Melalui Pengalaman)

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran khusus. Model ini didasarkan pada temuan-temuan Piaget bahwa aspek lingkungan mereka yang membingungkan atau nampak bertentangan. Oleh sebab itu, apabila model ini mau digunakan, waktu belajar harus diisi dengan kegiatan-kegiatan



yang dapat menumbuhkembangkan rasa ingin tahu siswa-siswa, dan yang mampu menyedot seluruh perhatian mereka. Hal ini misalnya berupa kegiatan bermain dengan atau melakukan suatu terhadap benda-benda konkrit atau bahan-bahan yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada benda atau bahan tersebut.

Model ini menitikberatkan pada cara siswa memproses informasi, pertumbuhan pribadi, dan keterampilan berinteraksi sosial.

Sementara itu agar guru dapat menggunakan model ini secara efektif, ia harus :

- 1) menyediakan benda-benda atau bahan-bahan konkrit untuk digunakan, ditelaah, atau diteliti oleh siswa-siswa;
- 2) menyediakan searangkaian kegiatan yang cukup luas sehingga menjamin pemenuhan minat siswa dan menumbuhkan rasa keterlibatan mereka;
- 3) mengatur kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang berbeda tingkat perkembangan kognitifnya akan belajar satu sama lain;
- 4) mengembangkan teknik-teknik bertanya untuk mengungkap alasan-alasan siswa yang mendasari respons-respons mereka;
- 5) menciptakan lingkungan kelas yang dapat meningkatkan perkembangan proses-proses kognitif.

#### d. *Group Inquiri Model* (Model Kelompok Inkuiri)

Model ini mengajar anak-anak untuk bekerja dalam kelompok untuk menginvestigasi topik-topik yang kompleks. Model beranggapan bahwa kemampuan untuk mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas dalam lingkungan kelompok adalah penting baik dalam situasi dalam kelas maupun di luar kelas. Anak-anak yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah dalam

kelompok demikian ini akan memiliki keterampilan-keterampilan social yang diperlukan untuk mendekati berbagai mata pelajaran dengan cara yang produktif.

Mengingat model ini menekankan pada keterampilan-keterampilan interaksi sosial yang berorientasi pada tugas, maka model paling sesuai dengan mata pelajaran Pkn bagi siswa-siswa Sekolah tingkat Dasar hingga Sekolah Tingkat Menengah.

Apabila guru-guru ingin menggunakan model ini secara efektif, maka mereka harus mampu:

- 1) membantu siswa-siswa merumuskan situasi-situasi yang menarik atau mengandung teka-teki, yang dapat diterima untuk penelitian atau layak untuk diteliti;
- 2) mengajar keterampilan-keterampilan untuk melakukan penelitian dan evaluasi tingkat dasar yang diperlukan bagi *inkuiri* yang berhasil;
- 3) membantu siswa-siswa mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kerja kelompok yang berhasil;
- 4) memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok dan mengambil keputusan-keputusan kelompok mereka sendiri.

Langkah-langkah yang diperlukan ditempuh guru dalam menggunakan model kelompok *inkuiri* ini sebagai berikut:

- a) menyajikan situasi dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan *inkuiri*
- b) merencanakan investigasi (penelitian)
- c) melaksanakan investigasi
- d) menyajikan temuan-temuan

e) mengevaluasi investigasi

e. *The Role Playing Model* ( Model Bermain Peran)

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk praktik menempatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Bermain peran dapat membantu mereka untuk memahami, mengapa mereka dan orang lain berpikir dan bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Dalam proses "mencobakan" peran orang-orang yang berbeda dari mereka sendiri, siswa-siswa dapat mempelajari baik perbedaan maupun persamaan tingkah laku manusia dan dapat menerapkan hasil belajar ini dalam situasi-situasi kehidupan yang nyata.

Agar guru-guru dapat menggunakan model ini secara efektif, mereka harus mampu:

- 1) menyajikan atau membantu siswa-siswa memilih situasi-situasi bermain peran yang tepat;
- 2) membangun suasana yang mendukung, yang mendorong siswa-siswa untuk bertindak "seolah-olah" tanpa perasaan malu;
- 3) mengelola situasi-situasi bermain peranan dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mendorong timbulnya spontanitas dan belajar;
- 4) mengajarkan keterampilan-keterampilan mengobservasi dan mendengarkan sehingga siswa-siswa dapat mengobservasi dan mendengarkan satu sama lain secara efektif dan kemudian menafsirkan dengan tepat apa yang mereka lihat dan dengarkan.

Adapun langkah-langkah pokok dalam penggunaan model ini sebagai berikut:

- a) memilih situasi bermain peran

- b) mempersiapkan kegiatan bermain peran
- c) memilih peserta/pemain peran
- d) mempersiapkan penonton
- e) memainkan peran (melaksanakan kegiatan)
- f) mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan bermain peran

f. *Quantum Teaching*

Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dengan demikian *quantum teaching* berarti suatu orkestrasi dari berbagai macam interaksi yang terjadi di dalam dan di sekitar momen atau peristiwa belajar. Interaksi-interaksi ini membangun landasan dan kerangka untuk yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. *Quantum teaching* ini juga menerapkan percepatan belajar dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi proses belajar alamiah dengan menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun bahan pengajaran yang sesuai, cara penyajian yang efektif, dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Disamping itu, *quantum teaching* juga memudahkan segala hal untuk menyingkirkan hambatan belajar dan mengembalikan proses belajar keadaanya yang mudah dan alami.

Prinsip yang dijadikan pedoman bagi *quantum teaching* sebagai berikut:

- 1) segala berbicara

Maksudnya, bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan kelas mengandung dan menyampaikan pesan tentang belajar

- 2) segalanya bertujuan

Hal ini mengandung arti bahwa semua kreasi anda terutama mengenai belajar mempunyai tujuan yang terukur

- 3) pengalaman sebelum pemberian nama

Prinsip ini menghendaki agar siswa belajar dengan mengalami sesuatu yang terkait dengan informasi yang sedang dipelajarinya sebelum mereka memperoleh nama tentang apa yang mereka pelajari atau dengan perkataan lain, sebelum mereka menemukan dan merumuskan konsep atau prinsip.

4) akui setiap usaha

Belajar merupakan suatu rangkaian usaha siswa dalam mencapai tujuan belajar, dan usaha itu sendiri mengandung resiko. Oleh sebab itu, siswa-siswa patut memperoleh pengakuan terutama dari guru atas usaha.

5) jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan "perayaan" ini dimaksudkan sebagai ungkapan pengakuan atas partisipasi, penyelesaian tugas, dan prestasi siswa-siswa.

#### G. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan sebagai suatu proses mempunyai dua sisi yang saling berkaitan erat. Kedua sisi proses tersebut yaitu proses teknis dan proses normatif. Kedua proses itu selama ini dikelola melalui pengajaran, sedangkan pengajaran itu sendiri sering kali menggunakan cara-cara tradisional, yang memfokuskan pada pemberian informasi dan pengetahuan kepada siswa, dan kurang memperhatikan perkembangan aspek afektif dan *banking concept of education* (mentransfer pengetahuan sebanyak mungkin) sehingga siswa bagaikan perpustakaan mini. Dengan cara semacam itu apa yang diperoleh siswa menjadi tak menarik dan kurang bermakna serta tidak mengembangkan kreativitas berpikir kritis, dan keterampilan hidup (*life skills*), selain juga suasananya tidak menyenangkan. Oleh sebab itu belajar mengajar semacam itu perlu diperbaiki agar proses dan hasilnya lebih berkualitas.

Model-model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibuat sebagai upaya membantu para guru dalam pembelajaran di kelas. Dengan perkataan lain model pembelajaran ini tidak dimaksudkan sebagai satuan pelajaran atau persiapan mengajar (*lesson plan*) yang membatasi kreativitas dan dinamika guru di dalam kelas, melainkan hanya sebuah “model” sebagai upaya alternatif untuk mencitakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Artinya sangat dimungkinkan bagi upaya guru untuk mengembangkan alternatif model pembelajaran lain yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PKn kemampuan guru dan kondisi setempat.

Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri-ciri khas pada pengembangan aspek afektif, oleh sebab itu guru diharapkan mengembangkan berkaitan dengan domain afektif.

Secara umum model pembelajaran yang dikembangkan dalam PKn berpatokan pada prinsip-prinsip di bawah ini:

- 1) memberikan kesempatan kepada siswa dan mendorongnya untuk keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran baik secara mental maupun secara psikomotorik, afektif dan interaktif.
- 2) memungkinkan siswa untuk menentukan sendiri konsep, prinsip, dan teknik-teknik interaksi dengan lingkungannya.
- 3) Memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa.
- 4) Memposisikan guru sebagai fasilitator belajar.
- 5) Memberikan rasa aman dan tenang buat siswa sehingga dapat belajar dengan betah dan merangsang berpikir kreatif.

## H. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20 rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemejemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dimanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasa 1945.

### 1. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia , Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam Pembelaan Negara, Sikap Positif Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peraturan internasional.



3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, Penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
5. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik meliputi: Pemerintah desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem Pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

## **J. Hakikat Pendidikan Multikultural**

### **1. Pengertian dan Ruang lingkup Pendidikan Multikultural**

Sebelum membahas definisi pendidikan multikultural sebaiknya jika dikaji terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup pendidikan multikultural. Will Kymlicka

mengatakan bahwa Multikultural merupakan satu paham tentang penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak individu maupun hak komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan budayanya.<sup>63</sup> Selanjut Naim dan Sauqi mengatakan bahwa multikultural adalah paham tentang kultur (budaya) yang beragam. Dalam keragaman kultur ini meniscayakan adanya pemahaman saling pengertian, toleransi, dan sejenisnya agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera yang terhindar dari konflik berkepanjangan.<sup>64</sup>

## 2. Kajian Megenai Pendidikan Multikultural

Pendidikan yang mengusung tema multikultural belum sepenuhnya dikenal oleh khalayak luas masyarakat Indonesia. Ainnurofiq Dawam (2003: 100-101) menjelaskan pendidikan multikultural secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan dan dengan cara mendidik. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti beragam dan kultur yang berarti budaya. Secara terminologis pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia agar dapat menghargai pluralitas dan heterogenitas.<sup>65</sup>

Sulalah (2012: 48) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu konsep untuk memberikan peluang pendidikan yang setara bagi semua peserta didik yang berbeda ras, etnik, kelas sosial, agama dan kelompok budaya. Banks & Banks (2005: 3) mendefinisikan bahwa:

---

<sup>63</sup> Will Kimlicka. *Kewargaan Multikultural: Teori liberal mengenai Hak-hak Minoritas*. Terjemahan oleh Eldina Afmini Eddin dari *Multikultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*, Jakarta, 2002) h. 8-22

<sup>64</sup> Naim & Sauqi. *Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 125

<sup>65</sup> Ainulrofiq. A, *Pendidikan Multikultura: Cross-Cultural Understanding. Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta; Pilar Media, 2003, h. 100.101

*“Multicultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process. Multicultural education incorporates the idea that all students regardless of their gender and social class and their ethnic, racial, or cultural characteristics should have an equal opportunity to learn in school.”<sup>66</sup>*

Berdasarkan pendapat Banks & Banks, maka pendidikan multikultural mencakup tiga hal yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah tanpa memandang jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik etnis, ras, atau budaya.

Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakangnya. Konsep pendidikan multikultural ditujukan untuk membekali peserta didik agar dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan. Gollnick & Chinn (2006: 6) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membahas tentang keragaman budaya dan kesetaraan di sekolah. Kesetaraan tersebut dimaksudkan bahwa semua peserta didik diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Pendidikan multikultural merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh keragaman. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 191) menambahkan bahwa pendidikan multicultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap saling menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat<sup>67</sup>. Agus Salim (2006: 25) menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses yang memberikan kesadaran dalam keragaman hidup bersama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan

---

<sup>66</sup> Banks and Banks. *Multicultural Education: Transforming Mainstreamcurriculum. Conecticul: Dushkin Mc.Graw-Hill, A. Division Of McGraw-Hill Companies, 2005.*

<sup>67</sup> Achamd Sauqi, 2010, h. 191

menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap toleransi, menghargai, dan menghormati keragaman ras, etnis, budaya, agama, bahasa, sosial, ekonomi, jenis kelamin sehingga dapat menerima dan hidup bersama dalam keragaman tersebut tanpa menimbulkan permasalahan. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik yang berasal dari ras, etnis, budaya, agama, bahasa, kelas sosial ekonomi dan jenis kelamin yang berbeda mendapat kesempatan yang setara dan adil untuk mengenyam pendidikan di sekolah dan dalam pembelajaran.

### 3. Tujuan Pendidikan Multikultural

Setiap bentuk kegiatan pasti terdapat tujuan, karena setiap kegiatan mengandung maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam proses dalam melaksanakan pendidikan multikultural.

Menurut Agus Salim bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah mengubah lingkungan pendidikan sehingga dapat meningkatkan rasa saling menghargai bagi semua kelompok budaya serta mendapatkan kesempatan perlindungan hukum dan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama.<sup>68</sup>

Semua peserta didik layak mendapatkan pendidikan yang setara walaupun berbeda latar belakang antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Banks & Banks merumuskan tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mengubah pembelajaran sehingga peserta didik memiliki

---

<sup>68</sup> Agus Salim. *Pendidikan Multikultural*, 2006, h.72

kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Peserta didik tersebut terdiri dari kelompok budaya, etnis, bahasa yang berbeda dan kedua jenis kelamin.<sup>69</sup>

Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi kultur, sosial, ekonomi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Zamroni (2011: 140) tujuan pendidikan multikultural yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada masing-masing peserta didik.

Tujuan pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Ainul Yaqin yakni terdapat dua tujuan yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal dari pendidikan multikultural adalah membangun wacana pendidikan multikultural pada guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan serta mahasiswa agar kelak mereka mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi kepada peserta didik. Tujuan akhir adalah peserta didik mampu bersikap demokratis, pluralis dan humanis.<sup>70</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas mengenai tujuan pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah peserta didik diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya secara optimal. Peserta didik dibekali sikap demokratis dan pluralis. Pembekalan sikap tersebut diharapkan agar kelak peserta didik memiliki sikap demokratis, bertoleransi, menghargai dan menghormati terhadap keragaman dan perbedaan.

---

<sup>69</sup> Banks. J.A and Banks, C.A. *Multicultural Education: Transforming the Maenstream curruculum*. Connicut: Dushkin, Mc Graw Hill, A Division of The Mc Graw Companies, 2005, p.13

<sup>70</sup> Ainul Yaqin. *Pendidikan Multikultura: Cross-Cultural Understanding. Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta; Pilar Media, 2005, h. 26

#### 4. Sejarah Lahirnya Pendidikan Multikultural

Istilah pendidikan multikultural masih tergolong sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Istilah pendidikan multikultural lahir di negara-negara barat. Lahirnya istilah pendidikan multikultural tumbuh dari adanya keragaman di negara-negara barat. Masyarakat negara-negara barat terdiri dari berbagai etnis dan ras yang ada di berbagai belahan dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, di negara-negara barat terdapat keragaman budaya bahkan yang paling mencolok adalah perbedaan warna kulit.

Berkembangnya pendidikan multikultural diharapkan kalangan mayoritas mampu menunjukkan rasa saling menghargai, menghormati dan bertoleransi terhadap kalangan minoritas. Paul Gorski (1999) dalam Agus Salim (2006: 21) menambahkan pendidikan multikultural tumbuh atas gerakan warga negara dari kelompok tertindas yang bermula saat orang-orang Amerika keturunan Afrika menentang diskriminasi.<sup>71</sup>

Tilaar (2004: 123-127) menyatakan lahirnya pendidikan multikultural dipengaruhi oleh proses demokratisasi masyarakat di dunia yang terkait oleh pengakuan HAM agar tidak membeda-bedakan warna kulit, gender dan agama; adanya *Marshal Plan* yakni pembangunan kembali di negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II yang menyebabkan banyaknya pekerja yang migrasi ke Eropa yang kemudian para imigran tersebut meminta keadilan dan pendidikan yang layak; lahirnya paham nasionalisme kultural yang disebabkan oleh lahirnya etnis-etnis baru dan budaya yang berasal dari imigran yang bermukim di negara maju.<sup>72</sup> Banks & Banks (2005: 6) menambahkan istilah pendidikan multikultural lahir dari gerakan masyarakat

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 2006, h.21

<sup>72</sup> Tilaar, H,A,R, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123-127

tahun 1960-an dimana orang-orang Afrika di Amerika menuntut hak-hak mereka. Tujuan dari gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an adalah untuk menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan publik, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan.<sup>73</sup> Mereka ingin mendapatkan kesempatan yang setara di berbagai bidang. Mereka menuntut agar sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mengubah kurikulum, menuntut sekolah mempekerjakan guru dan staf yang berkulit hitam dan coklat serta menuntut untuk merevisi buku pelajaran yang mencerminkan keragaman masyarakat di Amerika Serikat.

Berkembangnya pendidikan multikultural diharapkan kalangan mayoritas mampu menunjukkan rasa saling menghargai, menghormati dan bertoleransi terhadap kalangan minoritas. Zamroni (2011: 145) menjelaskan pendidikan multikultural merupakan gerakan reformasi pendidikan untuk membasmi penindasan dan ketidakadilan sehingga terbentuk keadilan dan kesetaraan pada peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal sesuai minat dan bakatnya.

Masyarakat di Eropa dan Amerika terdiri dari berbagai macam ras dan etnik. Perbedaan tersebut menimbulkan keragaman kultural. Akibatnya sering terjadi diskriminasi kultural di negara-negara barat bahkan diskriminasi di bidang gender, sosial, ekonomi dan agama. Terutama di Amerika sering terjadi diskriminasi terhadap orang berkulit hitam. Oleh sebab itu pendidikan multikultural lahir sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan pengakuan yang setara oleh masyarakat di negara-negara barat. Berikut rincian sejarah

---

<sup>73</sup> Banks & Banks, *ibid*, 2005, h, 6

lahirannya istilah pendidikan multikultural yang dikemukakan Abdullah Aly (2011: 101):<sup>74</sup>

Tabel 6.  
Sejarah Lahirannya Istilah Pendidikan Multikultural

Nama Negara	Faktor kelahiran	Media
Amerika (1960-an)	Praktik kehidupan social yang diskriminatif	Gerakan hak-hak sipil 1960-An
	Sistem pendidikan yang tidak adil	Kajian melalui pusat-pusat studi etnik
Negara Eropa: Belgia, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Swedia (1980-an)	Praktik kehidupan sosial yang diskriminatif dan sistem pendidikan yang diskriminatif	Tuntutan terhadap keadilan dan demokrasi dalam pendidikan
Australia (1975)	Kesadaran pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan multikultural	Program anti-rasisme melalui Pendidikan
Indonesia (2000)	Politik penyeragaman dan monokulturalisme selama pemerintahan Orde Baru	Kajian melalui simposium, diskusi, seminar, workshop, serta wacana ilmiah melalui koran, jurnal dan buku

Globalisasi juga menjadi penyebab penting lahirnya istilah pendidikan multikultural. Melalui globalisasi yang masuk, maka masyarakat kita yang kurang selektif akan mudah terpengaruh pada globalisasi yang masuk dan akan mudah melupakan budaya bangsa Indonesia sendiri. Choirul Mahfud (2009: 183) menjelaskan bahwa dewasa ini di Indonesia muncul wacana pendidikan multikultural yang salah satunya dilatarbelakangi oleh globalisasi yang menyebabkan peluang, ancaman dan tantangan bagi masyarakat tanah air yang berujung pada memudarnya kebudayaan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Zamroni, *ibid*, 2011, h. 145

<sup>75</sup> Chairul Mahfud, , 20 *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 183.



Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa istilah pendidikan multikultural berkembang di Eropa dan Amerika yang berasal dari munculnya gerakan masyarakat barat yang mengalami penindasan dan diskriminasi karena disebabkan oleh perbedaan. Mereka menuntut persamaan dan pengakuan hak agar tidak membeda-bedakan warna kulit, gender, agama dan mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik, tempat tinggal, pekerjaan dan pendidikan. Sistem pendidikan juga harus diubah dengan mengubah kurikulum, memperkerjakan guru dan karyawan yang berkulit hitam dan coklat serta merivisi buku teks yang mencerminkan keragaman, keadilan dan kesetaraan.

##### 5. Peranan Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Multikultural

Sekolah yang menerapkan pendidikan sekolah memiliki beberapa peran yang harus dijalankan agar tercipta suasana yang multikultural. Banks & Banks menyatakan bahwa:

*“To implement multicultural education in a school, we must reform power relationships, the verbal interaction between teachers and students, the culture of the school, the curriculum, extracurricular activities, attitudes toward minority languages (Beykont, 2000), the testing program, and grouping practices. The institutional norms, social structures, cause-belief statements, values, and goals, of the school must be transformed and reconstructed.”<sup>76</sup>*

Berdasarkan pendapat di atas untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah, maka sekolah harus mengubah bentuk interaksi antara guru dan peserta didik, budaya sekolah, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sikap terhadap perbedaan bahasa, program-program, norma-norma kelembagaan, struktur sosial, nilai-nilai, dan tujuan sekolah. Perubahan-perubahan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai multikultural.

---

<sup>76</sup> *Ibid.* p. 23

Kurikulum sekolah perlu dijadikan bahan pengembangan pendidikan multikultural. Choirul Mahfud menjelaskan kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum yang mampu memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, budaya.<sup>77</sup> Gollnick & Chinn menambahkan selain kurikulum formal, di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi yang terdiri dari norma-norma tak tertulis, nilai-nilai, dan hubungan sosial sekolah dan suasana kelas yang ada pada kepada peserta didik. Kurikulum tersembunyi mencakup norma dan nilai yang mendukung kurikulum formal yang harus mencerminkan keragaman dan perbedaan. Kurikulum tersembunyi memiliki dampak yang besar pada peserta didik dan guru. Kurikulum tersembunyi seperti struktur organisasi kelas dan sekolah, serta interaksi peserta didik dan guru.<sup>78</sup>

Banks & Banks menguraikan kurikulum tersembunyi sekolah seperti nilai dan norma seharusnya diperhatikan. Aspek-aspek dari lingkungan sekolah harus diubah menjadi budaya sekolah yang dapat mengajarkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok budaya yang beragam dan membantu peserta didik dari kelompok-kelompok tersebut mencapai keberhasilan di bidang akademis.<sup>79</sup> Zuly Qodir dalam Sari Jatmiko dan Ferry T. Indarto (2006: 60-61) menyatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keragaman agama, etnis, gender, dan suku yang akan memberikan manfaat kepada perilaku sosial peserta didik dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Sehubungan dengan hal tersebut maka sekolah hendaknya dapat menanamkan pemahaman dan sikap toleransi, menghargai dan menghormati sehingga dapat hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman.

---

<sup>77</sup> Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 5.

<sup>78</sup> Gollnick, D. & Chin, P. *Multicultural Education* (Colombus: Merrill, 2006), p. 337

<sup>79</sup> Banks and Banks, *op cit.* p. 23-24.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, sekolah dapat menciptakan peraturan yang di dalamnya terdapat Undang-Undang dan sanksi yang mencerminkan multikultural sehingga dapat mengajarkan untuk bertoleransi, menghargai dan menghormati.

*Kedua*, program dan kegiatan sekolah juga perlu diubah ke dalam nuansa multikultural yang adil, setara dan demokratis sehingga seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dalam program dan pendidikan tersebut. *Ketiga*, pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai pengembangan kurikulum. Kurikulum tersebut mampu memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, budaya, mengandung kesetaraan dan keadilan.

#### 6. Model Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki model pembelajaran. Model pembelajaran berorientasi pendidikan multikultural adalah bertumpu pada keragaman yang ada pada peserta didik. Gay (2002) dalam Zamroni (2011: 150) mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural tidak diterapkan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah namun pendidikan multikultural diusung sebagai suatu cara untuk memajukan peserta didik secara keseluruhan.

Tilaar berpendapat pendidikan multikultural tidak dalam bentuk mata pelajaran terpisah tetapi diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran ilmu sosial. Ainul Yaqin (2005: 25) menambahkan pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran dengan memanfaatkan perbedaan dan keragaman yang terdapat pada peserta

didik serta dapat melatih peserta didik agar memiliki sikap yang demokratis, humanis, dan pluralis.<sup>80</sup>

Ainnurofiq Dawam (2003: 95) menjelaskan model pendidikan multikultural adalah dapat memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan dan agama. Dengan kata lain model pendidikan multikultural dibentuk agar peserta didik dapat memahami, menghormati dan menghargai antar masyarakat dalam perbedaan di segala bidang.

Choirul Mahfud (2009: 187) menjelaskan pembelajaran berbasis pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk membentuk dan menciptakan masyarakat berbudaya, maksudnya adalah membentuk masyarakat yang dapat memahami dan menerima budaya dan keragaman yang ada; materi dalam pembelajaran berbasis multikultural terdapat nilai kemanusiaan, nilai bangsa dan nilai kultural; metode yang digunakan adalah demokratis agar dapat menghargai perbedaan dan keragaman; evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap budaya lainnya.

Pendidikan multikultural hadir sebagai suatu gagasan baru guna mengelola masyarakat yang heterogen. Pendidikan multikultural memiliki dimensi-dimensi dalam melaksanakannya. Dimensi-dimensi pendidikan multikultural yang dirumuskan oleh Banks & Banks.<sup>81</sup>

Berikut penjelasan dari dimensi-dimensi tersebut: *Pertama, content integrations*, dalam hal ini guru memasukan contoh-contoh dan materi dari berbagai macam budaya dalam pembelajaran. *Kedua, knowledge constructions*, guru membantu peserta didik dalam memahami dan menelaah implikasi dan prespektif budaya ke dalam pembelajaran. *Ketiga, an equity pedagogy*, guru mengubah cara

---

<sup>80</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tangan Golbal Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 181

<sup>81</sup> Banks and Banks. *op cit*, p.2

mengajar untuk memberikan pelayanan akademik bagi peserta didik dari berbagai ras, budaya, gender dan kelompok sosial kelas. Guru dapat menganalisis gaya belajar peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang dipakai. *Keempat, prejudice reduction*, guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman ras, etnik, budaya. Perangkat pembelajaran seperti materi dan metode berisi tentang keragaman dan perbedaan yang dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap positif. *Kelima, an empowering school culture*, sekolah menciptakan iklim sekolah yang terdapat kesetaraan dari kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam. Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam semua aktivitas di sekolah. Iklim sekolah dapat mempromosikan gender, ras dan kelas sosial.

Sulalah (2012: 51) menjelaskan keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya dilihat dari sudut pembelajaran saja, namun peran struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan juga berpengaruh.<sup>82</sup> Sulalah (2012: 111) menambahkan pencapaian hasil pendidikan multikultural bukan hanya dari kesiapan pembelajaran saja namun juga dari *human* sebagai *actor social*. Artinya perilaku peserta didik juga dapat dijadikan titik keberhasilan penerapan pendidikan multikultural.<sup>83</sup>

Pendidikan multikultural melibatkan beberapa faktor seperti objek yang menjadi kajian, budaya dimana materi tersebut diterapkan, pemahaman nilai materi dan metode yang digunakan. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dilihat perilaku sosial dari masing-masing pelaku yang menandakan tingkat keberhasilan pendidikan multikultural. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan multikultural tidak dalam bentuk

---

<sup>82</sup> Sulalah, *Ibid*, 2012, h.51

<sup>83</sup> *Op cit*, 201, h. 111

pembelajaran yang terpisah, namun dimasukkan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran dengan memanfaatkan keragaman yang ada pada peserta didik. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis multikultural ditujukan agar peserta didik dapat memahami, menghormati, menghargai dan bertoleransi terhadap keragaman. Sehubungan dengan hal tersebut, guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman.

Tujuan pembelajaran berbasis multikultural yaitu membentuk masyarakat yang berwawasan budaya dan keragaman sehingga dapat menghargai, bertoleransi, dan menghormati keragaman. Materi yang diajarkan mengandung nilai kultural. Oleh sebab itu guru dapat memasukan contoh budaya, etnis dan keragaman lainnya ke dalam pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahaminya.

Metode yang digunakan adalah demokratis yang menghargai perbedaan dan keragaman. Guru dapat menggunakan metode yang variasi untuk memfasilitasi peserta didik dari berbagai ras, budaya, gender dan kelompok sosial kelas. Guru dapat menganalisis gaya belajar peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang dipakai. Evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari sikap peserta didik terhadap budaya lainnya yang meliputi persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap keragaman lainnya. Sekolah dapat menciptakan iklim sekolah yang terdapat kesetaraan dari kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam dan mempromosikan keragaman. Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam semua aktivitas di sekolah. Keberhasilan pendidikan multikultural dipengaruhi oleh peran struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan.

## 7. Aksiologi Pendidikan kewarganegaraan

Aspek aksiologi PKn adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian, hasil pengembangan, dan atau hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian PKn yang telah dicapai bagi kepentingan dunia Pendidikan, khususnya untuk dunia persekolahan dan Pendidikan tenaga kependidikan. Salah satu contoh manfaat tersebut adalah dikembangkannya berbagai model berbagai model pembelajaran nilai yang merupakan salah satu misi PKn.

Menurut Dewey dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi Model pembelajaran nilai ini merupakan model utama dalam mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai Pancasila, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Sinopsis Model, yaitu model pembelajaran nilai menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Model Praktik belajar Kewarganegaraan) merupakan kerangka operasional pembelajaran nilai yang berfungsi sebagai wahana psiko-pedagogis untuk memfasilitasi peserta didik mengenal, memahami, meyakini, dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung sebagai hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara seperti: peka, tanggap, terbuka, demokratis, pro patria primus patrialis, pro bono publico, kooperatif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Model ini secara adaptif menerapkan konsep dan prinsip pedagogis *problem solving* dan *project inquiry oriented citizenship transmission*.
- b. Kompetensi Nilai yang Dikembangkan, yaitu dimana peserta didik diharapkan mampu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung atau melekat dalam hak dan kewajiban dan tanggung jawab warga negeri seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, pro patria primus patrialis, pro bono publico, kooperatif, kompetitif untuk perbaikan, empatik, argumentative dan prospektif dalam konteks

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia atas dasar keyakinan yang didukung oleh pemahaman dan pengenalnya secara utuh, dalam praxis kehidupan sehari-hari di lingkungannya.

c. Sintaksmatik

Dasim dan Karim membagu model ini dalam 3 lamngkah, yaitu Langkah 1. Pendahuluan, langkah 2. Kegiatan inti, dan langkah 3. Penutup.

<sup>84</sup>Langkah I. Model ini guru dituntut memberikan ilustrasi empiric mengenai isu dan trend dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya dalam rangka proses berdemokrasi. Selanjutnya Dasim dan Karim S bahwa bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara, pewaris sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan pemimpin bangsa dan negara di masa akan datang seyogyanya memehami dan menjalankan nilai, konsep dan prinsip demokrasi dalam konteks sosio politik dan sosio kultural Indonesia. Langkah 2. Kegiatan inti yaitu bertolak dari strategi inquiry, research, oriented learning yang dikemas dalam model project ala john Dewey dengan langkah-langkah: a) mengidentifikasi masalah kebiakan public dalam amsyarakat, b) memilih suatu masalah untuk dikaji dalam kelas, c) mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah, d) mengembangkan portofolio di kelas, e) menyajikan portofolio, f) melakukan refleksi pengalaman belajar.<sup>85</sup>

Dalam keseluruhan langkah guru mengorganisasikan kelas ke dalam sejumlah kelompok kecil 3-5 dan 2 kelompok besar terdiri 20 orang yang masing dibagi dalam 4 sub kelompok dan masing-masing beranggotakan 5 orang. Dalam setiap langkah siswa belajar secara mandiri adalah kelompok

---

<sup>84</sup> Dasim, D & Karim Suryadi, *PKn dan Masyarakat Multikultural*, h. 24-27

<sup>85</sup> *Ibid* h. 26



kecil dengan difasilitasi oleh guru dengan menggunakan aneka sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah.

Setelah fasilitasi guru selanjutnya diadakan kegiatan refleksi yang bertujuan secara individu dan Bersama merenungkan dan mengendapkan dampak perjalanan Panjang proses belajar bagi perkembangan pribadi siswa sebagai warga negara.

Topik inti yang dikembangkan dalam model ini adalah kebijakan public sebagai konsep politik yang bersifat generic yang di dalamnya embedded sejumlah nilai, konsep, dan prinsip demokrasi, Topik inti yang telah dikembangkan di sejumlah daerah di tanah air adalah: (1) kerukunan antar umat beragama, (2) konstitusi dalam kehidupan bernegara, (3) hidup berdemokrasi, (4) kesadaran hukum masyarakat, (5) ethos kebangsaan Indonesia, (6) harmoni dalam perbedaan, (7) penegertian internasional, dan (8) tanggung jawab warna negara. Untuk Langkah 3, Penutup, Sepuluh menit sebelum pembelajaran di tutup guru harus melakukan debriefing atau penegasan dan penguatan teradap nilai-nilai yang terkandung dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, pro patria primus patrialis, pro bono publico, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif, danperspektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

#### 8. Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural

Hefner mengillustrasikan Indonesia seperti halnya negara Malaysia dan Singapura sebagai negara memiliki jumlah besar kelompok-kelompok, etnis dan budaya, agama dan lain-lain yang mempunyai tantangan warisan dan tantangan pluralisme yang sangat mencolok (*cultural pluralism*). Kemajumukan bangsa

Indonesia dapat dilihat dari dua ciri yang unik, pertama secara horizontal yang ditandai adanya kenyataan kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertical ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan pertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikum).<sup>86</sup> Sementara menurut Kusumohamidjojo mengatakan fenomena masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam) itu tergambar dalam bhineka tunggal ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah berbhinneka, tetap terintegrasi dalam kesatuan. Namun demikian, pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa orde baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme.

Lebih lanjut Azra. A, mengatakan bahwa dalam politik ini, yang diberlakukan bukan penghormatan terhadap keberagaman (kebhinekaan, atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan.<sup>87</sup>

Lebih lanjut Saifuddin mengatakan Sentralisasi Orde baru yang memaksakan monomultikulturalisme, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebhinekaan dan multikulturalisme Indonesia.<sup>88</sup> Selanjut Saifuddin membagi dua kondisi yakni: pertama, desentralisasi mendorong ditingkatnya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. Integritas sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan yang terjadi. Kedua, desentralisasi politik masa kini sangat kurang

---

<sup>86</sup> Nasikum, 2007. H. 33

<sup>87</sup> Azra, A. dalam Dasim. B & Karim. S., *PKn dan Masyarakat Multikultural*, 2008 h. 29

<sup>88</sup> Saifuddin dalam Dasim. B & Karim. S, *PKn dan masyarakat Multikultural*, 2008, h. 29

memperhatikan dimensi kebudayaan. Keputusan untuk melakukan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar dan penting. *Ketiga*, Ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama dan golongan dan gejala ini dikuatirkan mengancam integrasi bangsa, para elit politik tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan.

Selanjutnya Suparlan mengatakan bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi adalah sebuah “masyarakat multik/ultural Indonesia”. Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat.<sup>89</sup> Menurutnya multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peacefull coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat,

Lebih lanjut Azra dalam Suparlan mengatakan bahwa individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa corak masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika bukan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Istilah multikulturalisme menurut Parekh dalam Syaifuddin sedikitnya ada tiga unsur yaitu: (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas

---

<sup>89</sup> Suparlan, 2005, h. 98

<sup>90</sup> Azra, A, 2006, h. 154

kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk merespon pluralitas tersebut.<sup>91</sup> Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian multikulturalisme adalah ada dua, *pertama*, multikulturalisme merupakan realitas social dalam masyarakat yang majemuk, dan *kedua*, multikulturalisme berarti keyakinan atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya.

Azra. A, mengatakan bahwa pembentukan masyarakat multikultural Indonesia tidak boleh *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistimatis, pragmatis, integrated, dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting Pendidikan formal maupun informal, langsung atau tidak langsung.<sup>92</sup>

Dalam konteks di atas, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan masyarakat multicultural. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran wajib untuk kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dan Mata Kuliah Wajib (MKW) untuk kurikulum Pendidikan Tinggi (pasal 37). Ketentuan ini diperjelas dan diperkuat lagi pada pasal (37) bagian penjelasan dari UU tersebut bahwa “Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam Pendidikan multikultural yakni mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Banks dalam Tilaar mengatakan terdapat lima dimensi yang terkait dengan Pendidikan multikultural. Kelima dimensi sebagai berikut:

“(1) *content integrated*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran disiplin ilmu, (2) *the knowledge construction process*, membawa siswa

---

<sup>91</sup> Saifuddin, *Ibid* 2006.h. 139.

<sup>92</sup> Azra, *Ibid*, 2006, h. 153

untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin), (3) *an equity pedagogy*, menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun social, (4) *prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, dan (5) *empowering school culture*, yaitu melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik”<sup>93</sup>

## 9. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang ”pengembangan model pelatihan PKn berbasis multikultural di SMP kota Pontianak” merupakan pengembangan dan sekaligus tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dimaksud adalah: ”Konflik Antar Etnis di Sambas, Studi tentang: Latar Belakang, Proses, dan Dampak Kerusuhan Melayu dan Madura Mei 1998 di Sambas”. Penelitian yang dilakukan Alkadrie bahwa Melayu Sambas dengan Madura merupakan masalah sangat sepele berawal dari kesalahpahaman pribadi dan melebar menjadi kerusuhan suku/etnis. Bahkan di Kalimantan Barat telah terjadi berkali-kali kerusuhan yang sama, dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah peristiwa Juli 1998 kerusuhan etnis Dayak dan Madura. Jika dilihat dari akar permasalahannya disebabkan banyak faktor yang melatarbelakangi konflik antar etnis tersebut adalah latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Ironisnya, konflik yang banyak diwarnai pembakaran, pengrusakan, dan pembunuhan itu banyak melibatkan para masyarakat, pemuda dan pelajar. Banyak kerugian yang diakibatkan peristiwa tersebut, oleh karena itu perlu segera dicari jalan keluar agar konflik yang mengancam disintegrasi bangsa tersebut tidak terulang lagi.<sup>94</sup>

”Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Dayak Dalam Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di SMP Kota Pontianak (Studi Kasus Tentang Upaya

---

<sup>93</sup> Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 2004. H. 132

<sup>94</sup> Alkadrie,

Pencegahan Budaya Kekerasan di Kalimantan Barat)” (Pelu, 2006 dalam Musadad, 2013). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaa pendidikan budi pekerti telah memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya aksi kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah. Tindakan membolos, perkelahian, merokok di sekolah, pelecehan seksual, hingga pemalakan menurun hingga 20% saja. Namun demikian, aksi kekerasan yang dilakukan siswa di sekitar lingkungan sekolah atau luar sekolah tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini lebih disebabkan dalam kenyataannya strategi pembelajaran yang dilakukan lebih bersifat kognitif melalui metode ceramah sehingga aspek afektif kurang mendapat kesempatan untuk dikembangkan. Selain itu, penanaman nilai hanya ditumpukan pada satu orang guru budi pekerti. Keterlibatan guru bidang studi lain sangat kurang. Hal ini mengakibatkan pendidikan budi pekerti hanya sebatas pengetahuan yang dangkal dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Keberadaan pendidikan budi pekerti dilatar belakangi adanya kerusuhan Juli 1998 yang menimpa Kabupaten Sambas dan beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat. Kerusuhan yang lebih merupakan konflik sosial dan etnik yang banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat Madura di Sambas dan Kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Tetapi dalam hal ini, guru pendidikan budi pekerti kurang menekankan pemahaman tentang pengakuan akan realitas keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat majemuk.

Penelitian Maghfiratun dan kawan-kawan (1993) mengenai kemampuan guru di SD menemukan bahwa, rendahnya kemampuan guru menggunakan strategi belajar mengajar menyebabkan suasana pembelajaran di kelas tampak kering, dan kegiatan belajar mengajar didominasi oleh guru. Penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan kurang memadai. Padahal dalam proses pembelajaran diperlukan

motivasi bagi siswa untuk meningkatkan semangat belajarnya guna perbaikan prestasi belajar.<sup>95</sup>

Selanjutnya hasil penelitian Partosoejono (1994) mengenai efektifitas mengajar guru SD lulusan PGSD (Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar 1) menyimpulkan bahwa kemampuan dasar mengajar, penguasaan materi bidang studi PKn masih lemah, yang mana pola pengajarannya masih tampak monoton dan belum tampak penggunaan multi metode. Oleh karena itu sulit mengharapkan siswa menguasai materi secara utuh. Sedangkan hasil penelitian Hamdan menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kompetensi mengajar dengan jenis kelamin, spesialisasi, dan prestasi akademik. Disarankan agar guru meningkatkan kompetensinya melalui variabel pengetahuan, kecakapan mengajar, manajemen kelas, perencanaan instruksional, kolegialitas, perhatian pada sekolah, perhatian pada siswa, dan perhatian pada diri sendiri untuk membangun citra dan kemampuan sebagai guru yang kompeten (2010: 610).

Menurut Sitaresmi (2003), peneliti dari Bandung, memperkenalkan paradigma multikulturalisme pada anak, dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberi contoh kehidupan sehari-hari, dan cara kedua secara tidak langsung, yaitu dengan menyampaikan cerita yang berisi pesan tentang multikulturalisme, antara lain dari dongeng, legenda, dan fabel.<sup>96</sup>

Hasil Penelitian serupa yang relevan adalah Carl A. Grant (2006) dalam penelitiannya yang berjudul: *The Evolution of multicultural Education in the United States: A Journey for human Rights & social Justice* menyimpulkan bahwa Evolusi pendidikan multikultural telah membuat ruang intelektual di mana masalah dan

---

<sup>95</sup> Maghfiratun

<sup>96</sup> Sitaresmi, <http://www.kompas.com/Kompas Cetak/0207/31/Daerah/nime28.htm> (Bandung)

isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, identitas budaya, dan sejarah yang berbeda-beda dapat dicari penyelesaiannya.<sup>97</sup> Teori-teori yang berlaku dapat dikritik dan di mana budaya, termasuk agama, ras, gender, dan status sosial ekonomi yang sering menimbulkan disharmonisasi dapat dibahas dan dianalisis sehubungan dengan struktur politik dan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pendidikan multikultural telah menciptakan liberalisme budaya dapat diinterogasi, tidak hanya untuk bertanya tentang mengapa budaya adalah penting, tetapi untuk belajar tentang fungsi, dan mengapa orang harus memiliki akses ke satu kebudayaan termasuk memungkinkan siswa untuk belajar tentang cara mereka dibentuk oleh dan terkait dengan budaya mereka. Akhirnya, evolusi pendidikan multicultural membuktikan ruang dan iklim di mana budaya yang berbeda dapat terlibat dalam dialog yang saling menguntungkan; yang mana berbeda seni, sastra, musik, moral, agama dan tradisi yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan, bahkan saling meminjam dan bereksperimen untuk menghasilkan ide-ide baru.

Johnson dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan multikultural dapat menekan sikap rasial siswa. Dalam penelitiannya, Johnson membagi sampel ke dalam empat kelompok, yaitu: kelompok pinggiran kota, dan kelompok perkotaan; serta kelompok umur 3-8 tahun, dan kelompok umur 9-16 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural lebih efektif dalam mengurangi sikap rasial di daerah perkotaan dengan efek ukuran rata-rata 0,72, dibandingkan di daerah pinggiran kota dengan efek ukuran rata-rata 0.587. Pendidikan multikultural juga lebih efektif dalam mengurangi sikap rasial antara kelompok usia 9-16 dengan ukuran efek

---

<sup>97</sup> Grant, C.A, The Evaluation of Multicultural Education in The United States, A Journey of Human Rights and Social Justice, [http://207.210.232.43/~u199080/download/turin\\_paper\\_grant.pdf](http://207.210.232.43/~u199080/download/turin_paper_grant.pdf). (diunduh 13 Januari 2016)



rata-rata 0,751, dibandingkan pada kelompok usia 3-8 dengan efek ukuran rata-rata 0,208.<sup>98</sup>

Isa Badrul (2005) dalam penelitiannya yang berjudul: *Multiculturalisme in Art Education: A Malaysian Perspective* menyimpulkan bahwa sebagai negara multiras, Malaysia menyadari pentingnya mengintegrasikan dan menyatukan berbagai ras dan etnis. Untuk tujuan tersebut, pemerintah Malaysia menjadikan Pendidikan sebagai alat yang utama. Terdapat asumsi bahwa setiap warga negara di negara ini sama, negara mengakui perbedaan budaya dan gaya hidup masyarakat, dan orang-orang yang ditanamkan dengan nilai-nilai untuk menghargai perbedaan-perbedaan ini. Salah satu cara untuk mengajarkan nilai-nilai ini adalah melalui generasi muda di sekolah.<sup>99</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Saloshna Vandeyar (2003), yang berjudul *The jagged paths to multicultural education: international experiences and South Africa's response in the new dispensation*, menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural mendapatkan respon yang positif di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah Negara yang punya keanekaragaman budaya dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Untuk mengurangi perasaan superioritas dari salah satu pendukung budaya di satu sisi, dan perasaan terpinggirkan dari pendukung budaya yang lain, maka pendidikan multikultural perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan antar budaya.

Beberapa hasil penelitian di atas, dapat dikaji bahwa: 1) pendidikan kita kurang berhasil menekan konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), terbukti peristiwa konflik anti Cina yang terjadi pada Mei 1998, kerusuhan antar etnis di

---

<sup>98</sup> Johnson, O, *Does Multicultural Education Improve Student, Rasipa Attudes? Implication for Closing the Acheivment Gap*, Journal of Black Stidies, November 2011, 1252-1274 42 (8) <http://jbs.sagepub.com/content/42/8/1252>. (diunduh 1 Juni 2016)

<sup>99</sup> Isa Badrul, *Multiculturalisme in Art Education, A Malaysian Perspektive*, Mara Malaysia, Faculty of Edaucation, Universiti Teknologi. Pp.1-22.<http://freedownload.is/pdf/multicultural-and-art-education-in-Malaysia-7489714.html>. (diunduh 16 September 2010).

Sambas Kalimantan Barat 1997-1998 banyak melibatkan para pelajar., 2) pendidikan budi pekerti yang telah dilaksanakan Barat khususnya di Pontianak belum memberikan hasil yang cukup berarti. Hal ini karena pendidikan budi pekerti disampaikan secara koqnitif, tidak menyentuh aspek afektif, 3) efektivitas mengajar guru masih rendah.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa, kompetensi guru masih rendah, guru hanya mengajar aspek koqnitif baik dalam proses maupun evaluasinya. Sedangkan aspek afektif dan psikomotorik selama ini masih terabaikan. Karena pembelajaran di sekolah hanya berkuat pada materi dan hafalan, sehingga kurang berarti dan kering dari nilai-nilai yang bermanfaat untuk membentuk siswa menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik. Dampak dari kurangnya nilai-nilai tersebut, maka banyak pelajar yang justru tergelincir pada tindak kekerasan, pelecehan seksual, pemalakan, dan tindak asusila yang lain. Meskipun demikian semua penelitian tersebut tidak memberikan solusi bagaimana upaya meningkatkan kompetensi guru, agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi penanaman nilai-nilai yang diperlukan siswa.

Sementara itu Sitaresmi (2003) menawarkan paradigma multikulturalisme pada anak. Penelitian Grant (2006) menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural dapat menekan masalah dan isu-isu sosial, hak asasi manusia, identitas budaya, dan sejarah yang berbeda-beda. Penelitian Isa Badrul (2005) di Malaysia, dan Vandeyar (2003) di Afrika Selatan sama sama menyimpulkan bahwa di kedua Negara yang berbeda tersebut adalah negara multi ras, yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda-beda. Untuk mengintegrasikan berbagai ras dan etnis di negara-negara tersebut, pemerintah melakukannya melalui pendidikan multikultural.

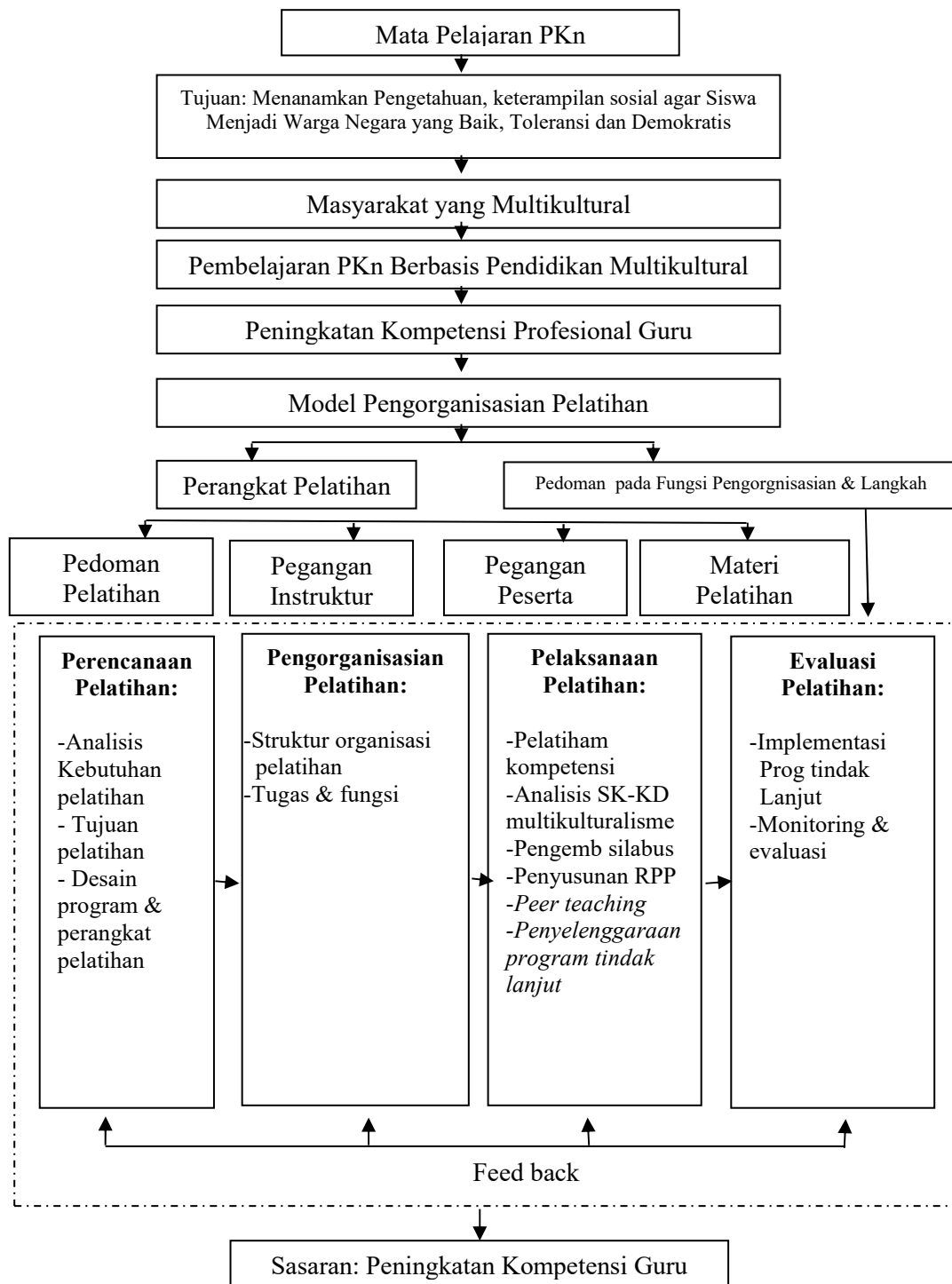
Selanjutnya Johnson (2011) berkesimpulan bahwa pendidikan multikultural dapat menekan sikap rasial siswa.

Penelitian-penelitian tersebut sebagian dilaksanakan dengan paradigma kualitatif, dan yang lain dengan pendekatan kuantitatif yang hasilnya hanya sekedar mendeskripsikan bagaimana pentingnya pendidikan multikultural. Penelitian di atas tidak mencoba mencari solusi bagaimana menerapkan pendidikan multikultural itu agar guru dapat melaksanakannya di sekolah.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan dari hasil-hasil penelitian di atas. Penelitian tentang “Pengembangan Model Manajemen pelatihan PKn berbasis Multikultural untuk meningkatkan kompetensi rofesional guru di SMP Negeri Kota Pontianak” ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Peneliti mencoba mengembangkan sebuah model manajemen pelatihan yang mudah dilaksanakan, dan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru PKn. Rancangan model pelatihan yang dikembangkan ditekankan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai multikultural yang relevan dengan mata pelajaran PKn, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran PKn berbasis multikultural sebagai upaya membekali peserta didik agar menjadi baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang multikultur ini.

## 9. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan uraian dari kajian pustaka dan penelitian relevan diatas, yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaran (PKn) adalah mata pelajaran yang wajib diberikan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Tujuan capaian pembelajaran PKn yang berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai kebhinekaan, keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Guru Mata Pelajaran PKn dalam penguasaan konten atau materi pokok pembelajaran yang menunjang proses revolusi mental dan terwujudnya warga negara yang baik, toleransi, mempertebal rasa kebangsaan, dan memperkokoh kecintaan kepada tanah air yang mampu berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab dalam kebijakan publik yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kota Pontianak yang merupakan *prototype* masyarakat yang memiliki keanekaragaman Suku, Agama, Budaya, dan Ras serta Gender berbaur menjadi masyarakat yang multikultural. Dalam kehidupan sehari-hari di Kota Pontianak berbaur berbagai suku dan etnis seperti: Melayu, Dayak, Tiongkok, Madura, Bugis, Batak, Jawa, Sunda, Banjar, dan Arab dengan keadaan sosial ekonomi yang beraneka ragam. Sedangkan dari segi penganut agama di Pontianak terdiri dari beberapa agama seperti: Islam, Katolik, Protestan, Kongfuchu, Hindu, dan Budha.

Atas dasar masyarakat yang multikultural tersebut, maka pembelajaran Mata Pelajaran PKn seyogyanya tidak mengutamakan pembelajaran aspek kognitif semata, tetapi perlu menanamkan pemahaman pada diri peserta didik tentang pengakuan realitas keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat yang mejemuk. Oleh karena itu disarankan bagi Guru Mata Pelajaran PKn untuk selalu mengintegrasikan nilai-nilai Multukultural dalam kehidupan sehari dengan mengintegrasikan ke dalam

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).

Fakta di lapangan ditemukan bahwa Guru belum melaksanakan pembelajaran secara profesional, pembelajaran yang dilakukan masih mengutamakan aspek kognitif dan metode pembelajaran yang digunakan masih dominan ceramah dan metode diskusi. Melihat kenyataan ini Guru perlu diadakan peningkatan kompetensi agar Guru mendapatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk melaksanakan pembelajaran PKn yang multikultural. Peningkatan kompetensi Guru harus dilakukan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yakni untuk meningkatkan kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian Guru salah satunya diupayakan melalui pelatihan.

Agar pelatihan PKn berbasis multikultural dapat berjalan lancar dan berdaya guna secara efisien dan efektif perlu dilaksanakan secara terencana, terorganisir dengan menyusun sebuah model dengan mengacu pada fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Disamping itu pelatihan akan dilengkapi perangkat pelatihan berupa buku pedoman pelatihan, buku pegangan narasumber/Instruktur, buku pegangan peserta pelatihan, dan materi pelatihan.

Berpijak dari kerangka berpikir di atas diasumsikan bahwa melalui pelatihan Multikultural Mata Pelajaran PKn dengan memberdayakan organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kota Pontianak dapat meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik Guru.

## 10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dan pengembangan ini berfungsi sebagai acuan untuk menguji model yang dikembangkan. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah: “Pengembangan Model Pelatihan PKn berbasis multikultural Melalui Pemberdayaan MGMP Dapat Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PKn SMP di Kota Pontianak”.